



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT PANJA MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) KOMISI X DPR RI DENGAN REKTOR PERGURUAN
TINGGI NEGERI**

- Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 30 September 2021
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d. 17.40 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X Gedung
Nusantara I DPR RI
(secara Fisik dan Virtual)
- Ketua Rapat : Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M. /
Wakil Ketua Komisi X DPR RI
- Acara
1. Pelaksanaan dan Evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka
 2. Peluang, Tantangan, dan Strategi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Untuk Menjawab Permasalahan Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Masa Depan
 3. Kendala dan Permasalahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka
- Sekretaris Rapat : Dadang Prayitna, S.IP., M.H.
(Kabag Sekretariat Komisi X DPR RI)
- Hadir : **Pimpinan:**
1. H. SYAIFUL HUDA
 2. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S., M.M.
 3. Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.
 4. Dr. DEDE YUSUF M.E, S.T., M.I.Pol.
 5. Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.
- Anggota:**
Fraksi PDI Perjuangan
6. dr. SOFYAN TAN
 7. PUTRA NABABAN (I)
 8. MY ESTI WIJAYATI
 9. Dr. AHMAD BASARAH (I)
 10. Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA

Fraksi Partai GOLKAR

11. FERDIANSYAH, S.E., M.M.
12. H. MUHAMMAD NUR PURNAMASIDI
13. DR. Drs. ADRIANUS ASIA SIDOT, M.Si. (I)

Fraksi Partai GERINDRA

14. ALI ZAMRONI, S.Sos.
15. Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN
16. ELNINO M. HUSEIN MOHI, S.T., M.Si. (I)

Fraksi Partai NASDEM

17. RIAN FIRMANSYAH, S.Pd. (I)
18. Dra. Hj. TINA NUR ALAM, M.M. (I)

Fraksi PKB

19. Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.
20. MUH. HASSANUDIN WAHID
21. Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.

Fraksi Partai DEMOKRAT

22. Ir. BRAMANTYO SUWONDO, M.M. (I)
23. ANITA JACOBA GAH, S.E. (I)

Fraksi PKS

24. Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.
25. H. MUSTAFA KAMAL, S.S. (I)

Fraksi PAN

26. Hj. DEWI CORYATI, M.Si. (I)
27. Prof. Dr. ZAINUDDIN MALIKI, M.Si.

Fraksi PPP

28. Hj. ILLIZA SAADUDIN DJAMAL, S.E.

Undangan

1. Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Diponegoro)
2. Prof. Dr. Ir. GREVO S. GERUNG, M.Sc. (Wakil Rektor 1 Universitas Sam Ratulangi)
3. Dr. Ir. ESRY LAOH, M.Si. (Deputi Wakil Rektor 1 Universitas Sam Ratulangi)
4. Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng. (Rektor Universitas Syiah Kuala)
5. Prof. Dr. Ir. MARWAN (Wakil Rektor 1 Universitas Syiah Kuala)
6. VICTOR MANENGKEY, S.H., M.H. (Ketua Tim Hukum Universitas Cenderawasih)

KETUA RAPAT/F-PKS (Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, M.M.):

Kemudian Rektor Universitas Syiah Kuala Aceh, Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal M.Eng, adakah? Ada? Oh sinyalnya jelek Aceh. Belum merdeka.

Kemudian Rektor Universitas Cenderawasih Papua, Pak Victor Manengkey S.H., M.H.

Sambil menunggu mungkin saya kira kita menghormati ini Prof. Yos ini sudah datang katanya 13.30 WIB mohon maaf Prof. karena ada paripurna dan kita enggak boleh memulai sebelum paripurna berhenti meskipun masing-masing kita sudah ada di sini. Tapi karena kalau paripurna belum selesai maka tidak boleh dimulai sehingga mohon maaf barangkali ada keterlambatan.

Mari kita memanjatkan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara fisik dan virtual dengan rektor perguruan tinggi negeri. Jadi kali ini dengan perguruan tinggi negeri karena nanti tampaknya masa sidang yang akan datang baru perguruan tinggi swasta. Sekali kita diberi kesempatan dan kesehatan dalam kondisi yang sehat walafiat mari kita selalu bersyukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Menurut laporan dari sekretariat dan sebagaimana tampak di layar saat ini Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual telah dihadiri sekarang sudah 16 dari 28 Anggota Panja Merdeka Belajar. 7 fraksi sudah bergabung yang berarti telah lebih dari separuh unsur fraksi dan juga lebih dari separuh anggota panja. Dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib telah terpenuhi. Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* perkenankan kami membuka hari ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB)

Selamat datang dan mungkin dari mahasiswa yang mengikuti program magang ya *internship* Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ini sebagai wujud dari pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada yang dari Undip enggak? Oh ada yang dari Undip. Ada rektornya di sini, ada rektor. Ternyata orang Semarang sampai ke sini juga. Dari mana ini FISIP apa bukan? Hukum? Ekonomi, terus ada teknik? *Ndak* ada ya? Terima kasih, silakan, selamat datang dan kita mengikuti rapat dengar pendapat ini.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Agenda rapat dengar pendapat dari ini adalah:

1. Pelaksanaan dan evaluasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

2. Peluang, tantangan, dan strategi Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk menjawab permasalahan perguruan tinggi dalam menghadapi masa depan.
3. Kendala dan permasalahan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Apakah agenda ini disetujui?

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati.

Terima kasih Pak Kadafi mantan rektor ini juga ya Rektor Abulyatama.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Anak muridnya Prof. Yos.

KETUA RAPAT:

Oh hukum juga ya? Mas Kadafi hukum juga ya dahulu ya? Ini Prof. Yos berarti.

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Iya yang menguji Prof. Yos waktu itu.

KETUA RAPAT:

Makanya enggak berani datang fisik ini. Bagaimana ada Pak Rektor ke sini.

Program Kampus Merdeka merupakan kebijakan Merdeka Belajar episode 2 seluruh rangkaian 13 episode yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kebijakan ini mencakup empat pokok kebijakan perguruan tinggi yaitu otomatisasi pembaruan akreditasi, hak belajar 3 semester di luar prodi, otonomi pembukaan prodi baru pada perguruan tinggi negeri, dan perguruan tinggi swasta, serta mempermudah persyaratan menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Sebagai kebijakan turunan dari Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka seharusnya juga memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis, serta kajian akademiknya.

Untuk itu dalam kesempatan ini kami dari Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka Komisi X DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari para

rektor perguruan tinggi negeri. Tentu tidak semua ini mohon maaf mungkin kalau yang mengikuti lewat YouTube atau mungkin lewat kanal-kanal sosial media pada saatnya mungkin bisa saja seluruh perguruan tinggi negeri tetapi di panja ini mohon maaf mungkin diwakili oleh beberapa universitas yang tadi saya sebut.

Jadi pelaksanaan dan evaluasi program Merdeka Belajar kemudian peluang, tantangan, silakan ini muridnya lagi Prof., Mbak Agustina Wilujeng, IKA Undip ini jangan-jangan. Peluang, tantangan, strategi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, menjawab permasalahan perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan, permasalahan dan kendala pelaksanaan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka di perguruan tinggi negeri.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati.

Berbagai informasi, masukan, usulan dari para pemangku kepentingan pendidikan tinggi seperti pejabat eselon I Kemendikbud Ristek, pakar pendidikan tinggi, praktisi perguruan tinggi dan lain-lain telah disampaikan kepada Komisi X DPR RI melalui Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Informasi dan masukan tersebut antara lain:

1. Program turunan kebijakan Merdeka Belajar yang telah memiliki kajian naskah akademik baru tersedia untuk asesmen nasional, organisasi penggerak, dan sekolah penggerak sedangkan Kampus Merdeka belum naskah akademik. Ini mungkin nanti kita akan kejar terus
2. Secara umum program Merdeka Belajar Kampus Merdeka belum memiliki konsep dan landasan hukum yang jelas sehingga kebijakan ini sulit mungkin dipahami dari tingkat konsep sampai tingkat teknis pelaksanaan dan secara praktis belum komprehensif khususnya penjelasan terkait proses akreditasi perguruan tinggi dan ketentuan perubahan menjadi PTN BH.
3. Program Kampus Merdeka dari sisi pelaksanaannya belum memperhatikan keberadaan perguruan tinggi swasta, kampus kecil atau yang berada di daerah terpencil. Ini masukan-masukan dari para pakar.
4. Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak memiliki implikasi terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi secara signifikan karena bersifat opsional dan sudah ada program serupa yang telah berlangsung selama ini yaitu KKN dan magang.
5. Ini poin-poin masukan-masukan dari praktisi dan akademisi atau pakar pendidikan. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak memuat hal baru dan bersifat elitis serta kurang merespons kompleksitas pendidikan di Indonesia.

Maka untuk memperkaya informasi dan masukan tersebut tim Panja Merdeka Belajar Kampus Merdeka Komisi X DPR RI perlu mendapatkan data, masukkan lebih banyak lagi khususnya dari rektor perguruan tinggi negeri selaku penanggung jawab pelaksana program Kampus Merdeka di perguruan tinggi masing-masing.

Bapak/Ibu hadirin yang kami hormati.

Itulah pokok-pokok pembahasan agenda RDP hari ini. Selanjutnya untuk efektivitas waktu kami persilakan kepada Rektor Universitas Diponegoro Prof. Dr. Yos Johan Utama untuk menyampaikan paparannya sesuai dengan agenda RDP hari ini, nanti dilanjutkan dengan rektor perguruan tinggi negeri yang lain yang virtual. Tadi laporan dari sekretariat rata-rata sudah telepon tetapi masuk ke Zoom-nya masih belum bisa. Ya mungkin problem PJJ begini ini, jadi sudah pada WA, sudah pada telepon juga tetapi ini baru yang kelihatan bergerak-gerak baru satu ini. Jadi yang dari Sam Ratulangi Prof. Grevo Gerung. Tapi yang lain masih enggak tahu ini memutar mungkin di atas.

Sebelum Prof. Yos menyampaikan paparan kita perlu sepakat waktu sampai jam? Pak Ferdi? Mbak Esti? 16.30 WIB. Sementara 16.30 WIB ya? Sampai 16.30 WIB.

(RAPAT: SETUJU)

Kami persilakan Prof. Yos karena yang hadir fisik mohon maaf yang di virtual kebiasaan kita mengutamakan yang fisik dahulu karena risikonya lebih tinggi. Silakan Prof.

REKTOR UNDIP (Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati dan kami banggakan Pimpinan Komisi X. Kemudian juga ini betulan tadi sudah WA dengan Mbak Agustina Wilujeng. Semoga selalu diberi limpahan kesehatan dan keselamatan semuanya. Serta para Anggota Komisi X semuanya DPR Republik Indonesia.

Yang saya bayangkan tadi itu saya bersama rektor-rektor yang lain yang mulia, Ketua tapi ternyata hanya saya sendiri. Jadi perasaan saya seperti lagi *fit and proper* untuk jadi hakim agung. Ya baik Bapak/Ibu sekalian mohon maaf ini diminta makalah dalam tempo yang begitu dekatnya sampai tulisannya Kampus Merdeka, padahal sebenarnya Kampus Merdeka Merdeka Belajar, itu merdeka belajarnya hilang. Langsung saja Mas, lanjut.

Bapak dan Ibu sekalian.

Mungkin saya menyampaikan apa yang sepengetahuan saya, apa yang saya pahami ya dan saya rasakan. Ini persis kalau saya lagi jadi saksi, biasanya demikian. Sering sekali soalnya di sini. Jadi kami mendapatkan satu petunjuk, *driven* ya, yang tentunya semuanya arahnya adalah tingkatan kualitas pendidikan tinggi tetapi mari kita lihat nanti satu persatu apakah

kemudian antara sesuatu hal metode yang dilakukan dan kemudian alat yang digunakan, regulasi yang ada, mampu mendukung untuk itu apa tidak?

Baik, jadi pertama lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, salah satunya itu. Ya *alhamdulillah* bukannya sombong tapi perlu disampaikan. Undip nomor satu se-Indonesia untuk alumni yang paling cepat dapat pekerjaan. Enggak tepuk *ndak* lulus nanti.

KETUA RAPAT:

Untung kita sudah lulus.

REKTOR UNDIP (Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.):

(suara tidak jelas) ada baru saja keluar itu.

KETUA RAPAT:

Untung kita sudah lulus.

REKTOR UNDIP (Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.):

Kemudian masuk dapat pengalaman di luar kampus, oke, dosen datang dari luar kampus, praktisi mengajar, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, kelas kolaboratif dan inovatif, program studi standar internasional. Lanjut Mas.

Sasaran-sasarannya ya kesiapan kerja lulusan, persentase dari lulusan yang segera mendapat pekerjaan dengan studi menjadi wiraswasta. Memang nanti bermuara di yang masalah Kampus Merdeka tadi. Mahasiswa di luar kampus, persentase mahasiswa S1, ya dia kan paling sedikit 20 SKS di luar kampus. Terus terang saya kalau yang ini saya kita dahulu ya sudah ada sejak saya zaman masih saya pun sudah ada ya bentuk-bentuk demikian itu ya makanya saya tidak menganggap satu hal yang baru bahwa itu sudah dilakukan. Cuma ketika menjadi 20 SKS saya ada sedikit komen nanti lagi. Apalagi itu bisa 3 semester, kalau 3 semester berarti 60 SKS nanti ya. Kemudian meraih prestasi paling rendah tingkat nasional ya walaupun kadang-kadang berpikir kalau yang universitas kecil ini bagaimana itu ya karena biaya besar juga itu. Lanjut Mas.

Dosen di luar kampus, persentase dosen berkaitan Tridarma di kampus ya sebagai praktisi di dunia industri. Nah nanti juga ada masalah ini berkaitan ketika dia PNS kalau habis waktunya di luar bagaimana ya? Jadi misalnya ada contoh saja misalnya bidang hukum ya tahu-tahu jadi konsultan di mana karena industri ini. Jadi nanti ketemu mahasiswanya bukannya di kampus malah di tempat lain nanti, ini salah satunya. Makanya ada satu hal yang mungkin perlu, kalau itu mau dituju berarti ada satu perubahan di regulasi yang ada.

Kemudian kualifikasi dosen, persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3. Mungkin Bapak/Ibu yang terhormat sudah paham dan sudah mengetahui kendala utama di situ apa? Regulasi. Regulasinya apa? Yaitu maksimum untuk tugas belajar itu usianya 40 tahun, itu dirunut dari Peraturan Presiden tahun 1961, saya belum lahir itu, jadi 40 tahun. Dosen-dosen sekarang sudah banyak yang sepuh-sepuh di atas 40. Ketika di atas 40 dia enggak bisa tugas belajar dia hanya bisa izin belajar. Izin belajar dikunci jalannya 60 kilometer. Kalau Undip itu 60 Km berarti datangnya ke Unnes saja tetangga saja. Jadi kalau belajar ke Solo saja sudah salah itu, itu contohnya begitu, 40 tahun Pak.

Akibatnya apa? Ya sudah S2 mandek, mau izin belajar prodinya enggak ada di Undip, prodinya enggak ada di Unnes misalnya, dia mau sekolah tempat lain juga enggak bisa karena itu harus tugas belajar. Tugas belajarnya aturannya maksimum 40 tahun. Permendikbud Nomor 48 Tahun 2009 kalau tidak salah, kalau itu sudah dibongkar saya kira *ndak* masalah ya. Kan belajar sepanjang hayat katanya, kalau belajar sepanjang hayat ya sampai bumi mau ditutup pun ya masih bolehlah tugas belajar. Bahkan yang kami biyai sendiri karena kami PTN BH kami punya duit kami biyai sendiri itu pun harus tunduk bahwa *ndak* boleh lebih dari 40.

Ya kemudian memiliki sertifikat-sertifikat ya sudah dan mohon maaf semua ini ada pengeluaran uang. Jadi ketika dosen harus sekolah, kami sekolahkan, kemudian harus bersertifikasi dia harus masuk ya ambil sertifikat perlu waktu juga, kalangan praktisi profesional segala macam. Nanti banyak masalah juga itu, lanjut saja. Riset nasional, jumlah keluaran penelitian pengabdian, mohon maaf sebelumnya. Kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional terapan itu ya kadang-kadang ya sudah jadi ya. Tetapi mohon maaf mungkin banyak di antaranya adalah masalah kenapa orang ogah penelitian itu adalah masalah SPJ-nya.

Jadi peneliti itu lebih sibuk mengurus SPJ daripada penelitiannya ya belum lagi kalau berkaitan dengan masalah pengelolaan dananya pakai rupiah murni wah itu sudah susah sekali misalnya pengeluaran berapa harus NPWP. Celaknya lagi menyewa kuda di daerah pegunungan ya yang punya kuda mendengar kata NPWP saja sudah bingung itu apa. Contohnya seperti itu, masalah-masalah seperti itu. Kenapa tidak misalnya berbasis *outcome* misalnya? Yang penting jadi. Oke lanjut.

Kemudian peningkatan kemitraan program studi, pembelajaran, akreditasi internasional, presentasi. Akreditasi internasional juga tidak murah Bapak/Ibu sekalian ya. Pengalaman kami kemarin kami keluar untuk berapa prodi itu 1 miliar Pak ya. Bayangkan kalau itu universitas kecil Pak. Walaupun mungkin Dikti menyiapkan, apakah bisa meng-*cover* semuanya? Itu menjadi pertanyaan besar juga. Misalnya kalau memang didorong ke sana dan lanjut lagi, silakan lanjut ya.

Nah prinsipnya kan selama ini Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ejekan, dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan

fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Berarti sejak awal *default* dari konsep Merdeka Belajar itu adalah otonom fleksibel. Tapi nanti kita masih lihat, kebetulan ini yang hadir saya dari PTN BH yang selalu digadang-gadang punya otonomi. Mari kita lihat nanti seberapa luas otonomi yang kami punya tadi karena ini adalah kuncinya di otonomi dan fleksibilitas. Lanjut silakan.

Nah implementasinya sudah ada dalam peraturan-peraturan ya kan? Nomor 4 Tahun 2020 tentang mengenai perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi badan hukum, PTN BH ya. Saya kadang-kadang mohon maaf Pak banyak teman-teman itu yang kepingin banget jadi PTN BH. Cuma mereka kadang-kadang belum tahu beratnya, yang dilihat adalah boleh menentukan remunerasi sendiri. Pertanyaannya kan cuma satu, ada duitnya apa enggak? Lah *wong* enggak ada duitnya di remunerasi apanya? Itu kan Jadi pertanyaan dan apalagi tuntutananya begitu besar. Nah itu yang saya kadang-kadang hati-hati sebelum melangkah ke sana ya.

Kemudian akreditasi program studi dan perguruan tinggi, kemudian mengenai penerimaan mahasiswa baru, program sarjana pada perguruan tinggi negeri, kemudian juga perubahan pembubaran pendirian perguruan tinggi, perubahan jabatan izin perguruan tinggi swasta. Lanjut Mas supaya cepat saja, diskusi yang banyak. Lanjut ya.

Program MBKM sesuai tadi disampaikan Beliau yang terhormat Bapak Ketua dengan kalimat yang berbeda bahwa program MBKM itu kan satu, kemudahan pembukaan program studi baru ya. Pertanyaannya benar mudah apa enggak itu saja. Memang kami selalu di-*inspiring* misalnya bikinlah misalnya prodi ini, jangan prodi yang kemudian itu-itu saja. *It's ok* siap kami ya, cuma nanti kita bisa lihat bersama-sama bahwa tidak sesederhana itu. Paling gampang saja mohon maaf kita bikin prodi baru nanti ditangkap enggak misalnya dari BKN atau Menpan-RB ketika pendaftaran mahasiswa. Kadang-kadang hanya kalimat satu kata saja, satunya misalnya teknologi dan informasi. Nih anak punya ijazahnya informasi, enggak bisa. Itu yang terjadi, ya kan? Apalagi yang kemudian baru yang kemudian hanya mengikuti tren yang sesaat. Kalau kita revolusi industri ini kan hari ini mungkin masih sesuatu yang hebat, besok pagi sudah tidak kan, bisa saja.

Perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi tadi sudah, kemudahan perguruan tinggi menjadi PTN badan hukum, hak belajar 3 semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan, bisa mengambil SKS di luar program studi 3 semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Nanti ya *monggo* ada pandangan-pandangan, beberapa pandangan kami sudah terwakili tadi yang *expert-expert* tadi kok hampir sama. Lanjut.

Ya kalau perubahan (suara tidak jelas) akreditasi sudah jelas ini. Ya kami ikut menikmati jangka waktu berlakunya itu dari 5 tahun jadi 10 tahun sekarang, kenapa 5 tahun kemudian ada perpanjangan tanpa kita harus minta, langsung memperpanjang kembali jadi 10 tahun ya. Karena untuk

akreditasi itu juga mahal Pak ya, enggak murah. Persiapannya segala macam bikin itu mahal apalagi kalau itu pakai seperti LAM itu mahal itu juga. Nah itu kalau perguruan tinggi yang besar mungkin enggak masalah tapi kalau kecil kan ya berat juga itu. Lanjut. Jadi perubahan itu ya jelas.

Kemudahan untuk PTN badan hukum ya program studi baru ini. Jadi belum tampak menurut saya yang signifikan kemudahan dalam pemilihan prodi baru. Semua masih melewati BAN PT dan untuk jadi BAN PT itu ya butuh waktu loh Pak, ya kan. Untuk kemudian melakukan verifikasi segala macam itu ada batas waktunya apalagi kalau kita masukan misalnya di bulan misalnya Oktober misalnya, oh sudah enggak bisa itu paling nanti kita harus menunggu tahun anggaran berikutnya. Tahun anggaran berikutnya itu sudah kadang-kadang momennya hilang. Inilah makanya salah satu kenapa harus selalu ke BAN PT *toh* nanti akreditasinya bisa kemudian ya atau dua tahun kemudian dilakukan akreditasi misalnya, walaupun saya yakin bahwa itu dilakukan tapi supaya ketika jalan itu sudah minimal begitu. Tapi kan bisa saja mungkin dengan aplikasi atau apa ya sehingga tidak perlu kemudian harus ada visitasi dan segala macam.

Kemudian kemudahan perubahan pola penamaan program studi tidak selaras tadi dengan rekrutmen PNS tadi. Itu yang menurut saya ya kasihanlah nanti misalnya kita buka nama program studi, masuklah mahasiswa, senang mungkin namanya bagus, indah, ngejreng tapi begitu dia lulus dia mau daftar PNS di sana masih pakai nama-nama konvensional. Misalnya nomenklaturnya ya misalnya akuntansi masih akuntansi, kemudian di sini ternyata misalnya akuntansi *online* misalnya. Oh sudah jadi berubah itu karena sudah enggak bisa. "oh enggak bisa ini hanya akuntansi saja". Hal-hal itulah menurut saya perlu nanti dipertimbangkan berkaitan dengan (suara tidak jelas). Lanjut.

Saya kira ini bentuk-bentuk dari MBKM-nya kan ini kan studi proyek independen, membangun desa, segala macam yang ini nanti saya mohon bisa kita kritisi. Lanjut ya, ada yang bentuk bebas, ada yang terstruktur. Langsung saja. Nah ini menurut saya permasalahannya ya. Kalau lancar 20 SKS ini ya. Kalau memang 3 semester dia 1 semester 3 dikatakan bisa menjalankan 20 SKS misalnya, pertanyaannya adalah apakah kompetensi keilmuan dapat tergantikan dengan program MBKM? Contoh misalnya karena itu enggak mungkin anak itu 144 tambah 20, enggak mungkin. Pasti yang 144 ini yang dikurangi 20.

Misalnya di bidang saya misalnya dia sarjana hukum kemudian di situ ada hal-hal yang berkaitan misalnya kemahiran bantuan hukum, segala macam itu, itu kemudian tergantikan 20 SKS yang 20 SKS itu misalnya ya program pengajaran mencuci tangan. Karena dia ada di desa yang akan mengajarkan begitu untuk COVID-19 segala macam. *It's ok* bagus. Cuma masalahnya sepadan kah ketika itu terjadi. Kemudian kan ada juga dan banyak pertimbangannya.

Ketika magangnya itu ya *insya Allah* semoga ang ditempati magang itu berkualitas tapi tidak kurang juga ya entah zaman saya dahulu melihat ya

sering anak-anak magang itu tugasnya bukan kemudian *involve* tapi kadang-kadang mohon maaf zaman dahulu ini “Dek tolong deh nasi padang dibelikan sana ya, Dek tolong difotokopi”. Akhirnya dia lulus menjadi sarjana rumah makan padang misalnya. Yaitu itu yang kami khawatirkan jangan sampai kompetensinya itu hilang. Ini yang menurut saya harus kita harus betul-betul hati-hati jangan sampai terjadi seperti itu maksud saya.

Kemudian kualitas pendidikan, sarana prasarana apa betul setara? Misalnya mohon maaf kalau ini kebetulan anak-anak saya ini ke Jakarta, ke DPR RI pastilah top istilahnya. Enggak ada DPR RI cabang dua kan enggak ada, pasti top. Tapi misalnya dia orang teknik, anak teknik kimia ya dari satu perguruan tinggi yang hebat, taruhlah UI misalnya depan segala macam. Terus tiba-tiba dia ada di salah satu pulau terpencil di Indonesia yang ada universitas kimia di sana dan mengambil di sana dengan kualitas sarana prasarana yang belum tentu sama dengan yang dipunyai oleh UI misalnya. Bahkan di tempat itu sendiri katanya kalau mau masuk laboratorium, dosen dan mahasiswanya bikin kasih hormat katanya. Ditanya kenapa kasih hormat? Karena usia alat-alatnya lebih tua dari dosennya. Ya makanya kalau mau negara ini hebat di dalam masalah teknologi saya kira lab itu ya enggak bisa tidak, komitmen masalah itu harus kuat betul menurut saya ya.

Kemudian kualitas dosen apakah sudah merata ya? Itu yang dosen loh *head-to-head* dosen, *apple to apple* dosen *to* dosen. Misalnya mohon maaf saya diajar ilmu hukum, misalnya di UI misalnya diajar di sana oleh Prof. yang ahli internasional dengan saya tahu betul Beliau sering kami undang, mengajar ya atau mungkin HTN diajar oleh Prof. Mahfud misalnya. Tahu-tahu dia diajar oleh dosen di tempat lain yang mungkin mohon maaf ini ya masih master, masih baru, itulah. Makanya kita harus memperhatikan itu, mempertimbangkan itu juga, menurut saya begitu.

Kemudian penyetaraan dengan mata kuliah. Ini pengalaman Bapak/Ibu sekalian banyak di prodi-prodi itu tidak mau dikonversi dengan itu. “oh tidak bisa Pak ini sarjana teknik kimia harus tahu ini, kalau dia ini enggak bisa Pak” itu kunci dibuat seperti itu. Inilah makannya (suara tidak jelas) menurut saya. Kalau misalnya mohon maaf ya kita pakai langsung *top down* dengan kebijakan saya kira tidak mungkin karena kewenangan di situ ada pada dosen. Dosen (suara tidak jelas) pengisian BKD ini juga begitu karena banyak yang di (suara tidak jelas) dosen di tempatnya ditinggal. Bisa jadi mungkin ya karena dikonversi-dikonversi itu dia kesulitan untuk BKD-nya. Kan dia harus mengajar, kalau pengajarannya diambil banyak ke sana.

Kemudian pengelolaan keuangannya juga demikian. Bagaimana ini? Bagaimana anak-anak ini membayar UKT-nya? Dia ikut kuliahnya tidak di Undip, di sini misalnya. Ini bisa ini bisa anak-anak ini pun bisa bertanya “Pak saya kan enggak menikmati layanan Undip *full* karena apa? Dari 24 SKS” *Insyallah* ya IP-nya 3 semuanya ya. kalau IP saya malah 5 ya ipar ya. Itu kemudian dia tanya “Pak saya kan di sini berarti saya layanannya enggak total di Undip, UKT-nya bagaimana?”.

Belum lagi mohon maaf dalam masalah pehonoran dari dosen pembimbing dan segala macam itu. Karena perbedaan ada yang model PTN BH, ada yang kemudian modelnya adalah BLU, ada lagi yang kemudian unit kerja ya. Nah ini bisa beda-beda caranya karena mereka yang dua ini dikunci dengan remunerasi sementara yang PTN-BH enggak bisa lebih dari yang ditetapkan dengan kelebihan kinerja, itu menjadi satu hal. Saya khawatirnya ada duitnya tapi enggak bisa dieksekusi karena ada regulasi berkaitan masalah keuangannya itu. Lanjut Mas.

Ini menurut saya ketika kita bicara masalah yang berkaitan dengan teman-teman didorong untuk ke PTN BH ya, saya sih saya senang ada banyak temannya, kebetulan saya koordinator PTN BH. Satu, yang jadi masalah di PTN BH itu berkaitan dengan ini karena semua orang didorong PTN BH maka harus tahu dahulu PTN BH seperti apa? Tidak adanya jatah tenaga PNS untuk PTN BH. Jadi saya ini termasuk *The Last Man Standing*, PNS terakhir dari PTN BH karena mereka akan semua terganti oleh pegawai Undip non PNS, apa artinya? Kami harus membiayai semuanya kelak suatu saat total yang harus kami biayai adalah 370 miliar. Karena selama ini kami dari rupiah murni 270 miliar yang tambah lagi BOPTN BH 100 ya 370.

Dampaknya bisa menjadi kenaikan uang kuliah nanti kalau kita tidak pandai-pandai mencari bisnis ini dan saya memang runut kok enggak ada ya aturan tentang bahwa PTN BH enggak boleh terima PNS itu enggak ada. Bahkan di dalam statuta dalam PP, peraturan pemerintah, jelas disebut pegawai PTN BH salah satunya adalah PNS. Sekarang ini kami pensiun itu tiap tahun 80 dan tidak ada gantinya sama sekali. Maka kami harus merekrut pegawai non PNS 80 juga dan 80 ini kami biayai semua dari awal hingga akhir nanti pensiun dibiayai oleh PTN BH, itu.

Kemudian karier pegawai di PNS di PTN BH itu sekarang tidak menentu. Semenjak adanya eselon III eselon IV dihapus segala macam itu mereka karyanya apa? Bahkan kemudian untuk menjadi jabatan fungsional tertentu itu dibagi ke masing-masing kementerian Pak. Sulit sekali, makanya akhirnya kami membuat jenjang karier sendiri tapi tentu saja biayanya biaya sendiri juga. Beban pajak Pak, progresif ya hanya gara-gara kami itu ada dana ya yang dahulu namanya PNBPN yang disebut non PNBPN maka dianggap mendapat dua sumber maka pajaknya pajak progresif. Beda kalau yang BLU itu sudah mereka final semua, kami progresif semua. Jadi tampak yang gede tapi potongannya 30% ya.

Terus kemudian beban meningkat bertambah banyak pegawai non PNS, kami sudah sebutkan. Otonomi pengelolaan Pak di bidang akademik maupun keuangan masih terbelenggu oleh peraturan di tingkat menteri seperti penentuan tarif UKT dan segala macam, penerimaan mahasiswa baru masih banyak lagi. Jadi kadang-kadang bilang ya otonominya itu di mana begitu ya, belum otonomi banget begitu.

Ya tadi, katanya bebas membuka Prodi. PTN BH itu Pak tapi ketika kami buka oh sekarang harus ada aturan melalui BAN-PT. Padahal ini kan PTN BH itu katanya satu universitas yang kemudian dengan keluwesannya

dengan otonominya menjadi tiang tombak pertama dari negara ini termasuk juga percepatannya segala macam. Yang kami dapatkan otonomi di antaranya paling masalah keuangan kami boleh atur sendiri ya itu saja, tapi begitu hal yang lain banyak yang kemudian kami rasakan bahwa itu kami harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada.

Kemudian pembentukan prodi baru tadi BAN PT sudah Pak dan kalau tempat kami malah saya hitung hati-hati juga Pak karena begitu bentuk prodi baru itu artinya harus hati-hati bahwa dia harus bisa menghasilkan jumlah yang kemudian mampu mandiri. Kalau tidak hanya sekedar ikut-ikutan atau mungkin sekedar ini tapi nanti hasilnya kurang itu jadi beban itu. Jadi kami saya targetkan yuk bikin prodi baru tapi Anda mampu menghasilkan pendapatan yang cukup untuk Anda mandiri. Kalau tidak nanti jadi *call center*.

Nah ini yang terakhir pajak atau SiLPA ini. Itu yang sudah berumur 4 tahun jika tidak (suara tidak jelas) kami kena pajak Pak. Loh saya kok pikir itu institusi yang cari laba apa bagaimana kok konstruksinya malah dikenakan pajak padahal kan *saving* ini kan mau digunakan contohnya bangun. Karena kami tidak pernah dapat 1 sen pun ya yang kemudian langsung terprogram kecuali memang sifatnya *top down* ya. Untuk pembangunan gedung ini, gedung ini enggak ada Pak, yang PTN BH enggak ada. Kalau ada misalnya paling dari PU itu ya dari rusunawa itulah yang *top down* memang ada dari sana. Ini yang kalau ini bisa kami kelola tidak kena pajak segala macam dan aman karena akuntabilitasnya kan dijaga. PTN BH itu pemeriksaannya enggak main-main dari BPK, dari Irjen, dari KAP, dari BPKP semua ada melakukan pemeriksaan di situ. Kenapa itu tidak bisa kemudian di-*invest*-kan.

Pendek kata begini Pak kami MBKM terutama yang berkaitan dengan kuliah yang ada di luar, ada *outbond*, *inbond* ndak masalah, oke. Tetapi mohon dihitung apa betul kemudian 20 SKS itu mohon dipertimbangkan lagi SKS-nya itu jumlahnya ya. Kalau masih misalnya mohon maaf ya 4, 5 itu oh *it's ok* Pak tapi 120 itu sudah menyodok ke kompetensi. Ya ini kan belum lagi kemudian kualitas dari yang kemudian diberikan pada anak-anak ikut magang itu apakah betul telah betul-betul diberikan sesuai dengan tujuan tadi.

Saya yakin kalau yang ada di sini mungkin ada kemudian ada mentornya, diajak ya, tapi kalau kemudian misalnya ya mereka magang di industri mungkin industri pun yang bos-bosnya *it's ok* ya (suara tidak jelas) tapi kita di level bawah ini merepotkan ini anak-anak ini, misalnya seperti itu. *Insya Allah* itu hanya khayalan saya ya tapi kalau misalnya ada "sudah dek, yang penting adik duduk saja deh, lihat-lihat saja ya nanti seminggu dua minggu sudah selesai oke." Itu menggantikan tentang satu pengajaran ya misalnya masalah rumus-rumus kimia atau misalnya tentang masalah teknik membuat surat gugatan misalnya bisa hilang.

Itu makanya menurut saya ini bagus tetapi harus lebih terarah ya, kita lebih harus hati-hati betul. Karena ini kerusakannya kalau misalnya terlalu lama juga bisa berbahaya kalau misalnya kemudian kompetensinya tidak cukup ya. Mahasiswa lulus merasa dia sudah gelarnya sarjana hukum tapi sebetulnya di dalam ya (suara tidak jelas) di dalamnya itu ya kekurangan 20

kemampuan yang standar. Memang ada dicontohkan oh nyatanya ada kok orang dari nuklir atau apa begitu, ilmunya nuklir segala macam nyatanya itu bisa jadi direktur bank, habis itu jadi ini. Ya saya pikir, lah kalau begitu buat apa kita bikin prodi dengan spesifikasi? Kenapa kita bikin laboratorium? Kalau semua caranya berpikir sifatnya mau dicari umum, ya kan.

Kalau memang cara berpikirnya begitu loh ya, buat apa kita bikin prodi, prodi itu ketatnya bukan main untuk akreditasi. Bukunya ini, macam-macam, pertanyaannya segala macam. Tapi tiba-tiba kemudian dikalahkan dengan para ada yang mengatakan bahwa semua itu pokoknya sarjana umum nanti di tesnya juga umum. Mau Kepala Dinas Kesehatan berasal dari teknik tidak masalah ya karena diterimanya umum misalnya. Ya apa itu yang memang kita tuju? Ya apa sudah didalami betul? Kalau menurut saya kok garis lurus nya masih tetap sarjana hukum jadi jaksa, jadi hakim jadi ini. Ketika sarjana hukum tiba-tiba jadi misalnya pengusaha saya kira itu bukan menjadi contoh ya, itu *exceptional* kalau itu. Saya tetap bahwa dia harus bekerja di bidang itu karena sejak awal dia ditunjukkan dengan kompetensi tertentu.

Itu sedikit dari saya yang terhormat Pak Pimpinan Komisi X. Mohon ya kami beberapa hal yang tentunya ini bisa menjadi masukan untuk perbaikan ke depannya. Kami menyambut baik MBKM tetapi tentu dengan masih ada perbaikan-perbaikan. Terima kasih.

Wa billahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Prof. Yos Johan Utama.

Saya kira ini suatu yang banyak ini masukan-masukannya karena rill ini karena ini Prof. Johan ini, Prof. Yos ini kan masih rektor jadi masih artinya tidak berbicara yang tidak hanya mengawang-ngawang. Ini rill di lapangan seperti itu dan oleh karenanya saya kira terima kasih sekali Prof. untuk waktunya juga ini sangat bermanfaat untuk memberikan masukan-masukan supaya nanti. Karena ini ujungnya kayaknya nanti sampai ke perubahan Undang-Undang Sisdiknas cuma ini mengetengnya sudah 13 episode untuk Merdeka Belajar itu.

Bapak/Ibu.

Ini selanjutnya langsung yang ke virtual ini karena yang fisik sudah. Yang ada dari Sam Ratulangi, Profesor Grevo Gerung. Silakan Prof.

WAKIL REKTOR 1 UNIVERSITAS SAM RATULANGI (Prof. Dr. Ir. GREVO S. GERUNG, M.Sc.):

Terima kasih.

Oh nanti ditampilkan ya *powerpoint*-nya? Atau saya tampilkan *powerpoint*-nya? Saya tampilkan ya Pak *powerpoint*-nya? Presentasinya? Atau dari sekretariat? Oh ya terima kasih. Terima kasih saya kira tadi.

KETUA RAPAT:

Kalau sendiri boleh dilepas katanya Prof.

WAKIL REKTOR 1 UNIVERSITAS SAM RATULANGI (Prof. Dr. Ir. GREVO S. GERUNG, M.Sc.):

Terima kasih saya kira tadi dari PTN BH hebat sekali Pak Rektornya dan rada-rada 90% sama masalahnya juga dengan kami yang BLU atau satker-satker seperti ini. Baiklah silakan *powerpoint*-nya, silakan dilanjutkan. Baik jadi ini sama juga dengan tadi bahwa ada Kampus Merdeka. Nanti kesimpulannya mungkin kami akan katakan Kampus Merdeka itu oke, Mereka Belajar Kampus Merdeka itu oke karena ada banyak contoh di universitas luar negeri sebenarnya yaitu kayak Kampus Merdeka Pak. Jadi kita itu lulusan di luar itu biasanya kita mengambil kompetensi kita dan suka-suka kita mau belajar apa selain itu. Misalnya saya dari perikanan kelautan saya mau saja mengambil mata kuliah di tempat lain untuk musik atau saya ambil hukum dan lain-lain kayak seperti itu. Jadi kita membeli pelajaran di tempat yang lain mungkin kayak begitu mungkin yang dipikirkan oleh pemerintah sekarang ini seperti itu.

Nah ada 8 indikator ini yang tadi juga sudah disampaikan pada dasarnya untuk 3 kepentingan itu kualitas lulusan, kualitas kurikulum, dan kualitas dosen dan pengajar. Nah kalau kita bicara kualitas lulusan tadi banyak juga hal yang harus kita perhatikan apakah lulusan yang dikeluarkan itu yang penting dia bisa mendapatkan IPK 4, *cumlaude* dan kemudian lamanya studi 4 tahun S1. Beberapa tahun yang lalu ada selentingan atau mungkin ada kebijakan bagi mereka yang lulus *cumlaude*, IPK 4 bisa ada jalan lurus untuk jadi PNS.

Seperti itu mungkin beberapa tahun yang lalu sehingga orang berlomba-lomba untuk (suara tidak jelas) yang penting punya IPK 4 dan kemudian lulus 4 tahun sehingga *cumlaude*. Tetapi dalam Kampus Merdeka tidak demikian, enggak akan terjadi seperti itu. Yang diharapkan sekarang adalah itu diserap oleh masyarakat secara langsung. Maka kita tidak saja *output*-nya tapi *outcome*-nya nanti. Nah *outcome* itu diindikasikan bahwa berharga di luar, ada orang yang IPK 4 enggak berharga di luar, ada yang *cumlaude* enggak berharga di luar tapi jadi (suara tidak jelas).

Kualitas kurikulum. Ini kita ini dalam 15 tahun terakhir empat kurikulum yang kita lalui. Kita baru saja selesai merancang kurikulum 4.0 tiba-tiba kita harus masuk ke Kampus Merdeka. Itu 2019-2020 kita baru merancang kurikulum 4.0 kompetensinya di situ, kita harus masuk lagi ke Kampus Merdeka. Kemudian kualitas dosen dan pengajar tadi yang sudah disinggung oleh Pak Rektor. Yang diminta sekarang dosen berkualitas, sama dengan

masalah di Unsrat juga tetapi yang 40-an tahun enggak bisa. Ini saya baru disposisi 4 orang yang tidak bisa dikasih tugas belajar karena 40 koma sekian tahun, 41 tahun dia enggak bisa masuk, enggak mengajar lagi. Kalau izin belajar ya susah paling Unima, Universitas Manado yang dekat-dekat kita karena tidak lebih dari 60 kilometer. Jadi ini tadi sudah saya setuju saja dengan yang disampaikan Pak Rektor tadi, kualitas dosen.

Belum lagi ada penerimaan dosen yang 2 tahun lalu, kedokteran misalnya. Kedokteran itu enggak jelas sekarang ini profesi dokter itu mau disetarakan dengan S2 atau tidak lagi? Jadi ada regulasi yang kadang-kadang kita langgar seperti itu. Kalau dia PPDS, dokter spesialis nyata-nyata disetarakan dengan S2. Tapi penerimaan kedokteran yang lalu itu profesi dokter diterima itu padahal S1-nya kemudian profesi dokter belum spesialis dua, belum PPDS, belum spesialis satu apalagi spesialis dua ini. Berikut.

Ini adalah gambaran dari Kampus Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ada total semester yang harus diselesaikan oleh mahasiswa yaitu 8 semester. Dalam kami atau beberapa kampus mungkin kita membagi mata kuliah di dalam 8 semester tersebut. Semester 1, semester 2 adalah mata kuliah-mata kuliah umum. Semester 3, 4, dan 5 mata kuliah yang kompetensi pada program studi tersebut. Kemudian 6, 7, dan 8 itu adalah untuk selesai, kadang-kadang banyak juga yang selesai di semester 7 karena undang-undangnya bisa memberi kesempatan di 3,5 tahun tidak perlu 4 tahun.

Kemudian muncul sekarang Kampus Merdeka memberi 3 semester di luar prodi. Yang pertama adalah di dalam kampus itu Merdeka Belajar kemudian Kampus Merdeka luar prodi tapi sebenarnya bukan 3 semester dan sebenarnya bukan 60 SKS tadi dikatakan Pak Rektor tapi dia bisa sampai 80 SKS. Kenapa sampai 80 SKS yang saya tidak tahu ini kementerian mempertimbangkan atau tidak. Mahasiswa itu mengambil di semester 2 itu 20 SKS di luar program studinya. Kemudian dia diberi kesempatan mengambil 20 SKS di luar kampus di semester 6 dan semester 7, 40 SKS. Padahal ada kesempatan untuk ikut IISMA *Indonesia International Student Mobility Award* yang kemudian SKS-nya ditambahkan juga. Kemudian ada kesempatan mahasiswa untuk mengikuti yang namanya kampus mengajar 12 SKS ditambahkan juga di situ.

Nah IISMA bisa diambil di luar semester 6 dan 7, bisa diambil di semester 5. Artinya dia bisa mengambil semester 2, 5, 6, 7 Kampus Merdeka. IISMA itu masuk dalam Kampus Merdeka. Jadi total SKS-nya kalau dihitung-hitung itu bisa lebih dari 70 SKS-80 SKS yang dihitung dari Pak Rektor iya. 144 SKS dikurangi dengan 70 SKS sisa 70 SKS. Nah 70 SKS dikurangi dengan 18 SKS wajib nasional, dikurangi dengan kalau Unsrat (suara tidak jelas) ada 8 SKS juga wajib universitas dikurangi dengan 6 SKS skripsi, tinggal berapa SKS kompetensinya yang ada di situ? Ini yang menjadi *concern* bagi kita sehingga banyak kampus yang merasa loh ini memang merdeka dari kompetensinya, merdeka dari kompetensi program studi. Itu bisa ambil dari 70 SKS.

Persoalan yang muncul sekarang adalah regulasi kita masih menetapkan adanya mata kuliah wajib, mata kuliah pilihan dan lain-lain. Jika seandainya regulasinya muncul keluar yaitu banyak mata kuliah wajib program studi kompetensi, wajib nasional, wajib universitas kompetensi dan kemudian sisanya dijadikan saja mata kuliah pilihan mungkin lebih gampang kita mengatur kurikulumnya. Ke depan mungkin akan jadi begitu. Ini yang terjadi di Universitas Sam Ratulangi. Semester 1 mereka masuk, semester 2 diberi kesempatan untuk mengambil di program studi yang lain lalu kompetensinya di mana?

Sekarang mahasiswa teknik dia diberi kesempatan untuk mengambil 20 SKS di Fakultas Hukum, diberi kesempatan untuk mengambil SKS di fakultas perikanan, pertanian. Artinya 20 SKS yang kemungkinan dia ada berapa 6 atau 7 mata kuliah itu bukan 6-7 mata kuliah di teknik sipil tetapi 6-7 mata kuliah di fakultas hukum, fakultas ekonomi dan lain-lain, kehilanganlah dia 20 SKS itu. Oke balik lagi ke program studi, masuk di semester 3 dapat lagi kompetensi program studi. Dia masuk di semester 4, masuk semester 8 dan masuk di semester 7, masuklah dia ke Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memberi kesempatan dia untuk bekerja di luar, magang dan lain-lain di luar kompetensi yang ada.

Sekarang bagi kami sih Unsrat kami mengatakan ya untuk mengambil kompetensinya sesuai dengan kalau dia magang kalau orang teknik ya sudah magang saja di perusahaan-perusahaan, di du/di-nya, dunia usaha dunia industrinya yang berhubungan keteknikan di situ. Tetapi sebenarnya dia tidak dilarang untuk mengambil tempat lain misalnya ya orang pertanian dia mengambil Kampus Merdeka dalam program kampus mengajar yaitu mengajar di SD. Bisa seperti itu sudah terjadi di tahun 2020, nah sekarang kompetensinya di mana? Kalau SD itu biologinya enggak ada cuma ada agama di situ dan kemudian kewarganegaraan. Nah itu yang diajarkan di situ karena dia harus bekerja di SD waktu itu, nah sekarang kelihatannya sudah meningkat sampai SMA.

Kemudian sama juga di semester 6 tadi semester 7 sama seperti itu, jadi kehilangan kompetensinya dia. Nah 144 SKS yang kita hitung tadi itu dikurangi 70 SKS maka sisa sedikitlah, sisa 70-an SKS dikurangi skripsi lagi. Ini yang harus menjadi pertimbangan. Memang benar bahwa Kampus Merdeka itu memberikan kesempatan benar untukawasannya lebih bertambah tetapi mempengaruhi kurikulum kita yang ada sekarang ini. Sementara kita belum menerima instrumen kurikulum Kampus Merdeka. Berikut.

Ada empat komponen dalam Kampus Merdeka. Pertama pembukaan program studi baru, benar bahwa pembukaan program studi baru bagi kami adalah itu mengeksplorasi kompetensi keilmuan untuk penguasaan teknologi, benar kita membuka program studi baru. Tapi sama dengan tadi kata Pak Rektor enggak gampang di situ untuk membuka program studi baru, regulasinya terlalu rumit juga. PTN BH mungkin lebih gampang daripada BLU atau satker. Malahan ada wacana "oke silakan membuka program studi kelapa, silakan buka program studi yang sangat spesifik". Tetapi ketika kita

membuka program studi spesifik sementara Kampus Merdekanya jalan, maka 70 SKS itu bukan lagi spesifiknya di program studi tersebut.

Kemudian sistem akreditasi perguruan tinggi yang tadi ini memang benar membuka ekosistem akademik yang lebih transparan dan bertanggung jawab tentu saja. Sebab kita harus serius dan mempertahankan standar perguruan tinggi kita di situ. Tapi susah juga misalnya kasus seperti ini, dalam BAN PT sekarang ini menerapkan perpanjangan secara langsung tetapi sebenarnya tidak demikian. Yang dievaluasi oleh BAN PT ketika masa akreditasinya belum berakhir masih 6 bulan dia mengevaluasi dengan instrumen yang namanya IPEPA dievaluasi.

IPEPA ini hanya melihat dari PD Dikti, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Pangkalan data pendidikan tinggi ini tidak 100% benar dengan fakta yang ada di perguruan tinggi. Jadi sistem akreditasi ini dipengaruhi oleh sistem yang banyak sekali, sangat-sangat sulit kita untuk begitu misalnya dosen yang sudah master, S2 jadi S3 jadi doktor begitu *approve* masuk ke pangkalan data pendidikan tinggi lambat sekali. Sehingga pada waktu IPEPA BAN Dikti melakukan pemantauan, dosen yang sudah doktor itu dianggap belum doktor karena belum masuk dalam pangkalan data perguruan tinggi, sehingga dievaluasi bahwa tidak layak untuk diperpanjang. Ini jadi masalah.

Yang kedua ketika kita ada instrumen akreditasi namanya ISK yaitu untuk mengonversi dari A ke unggulan dan sebagainya. Tetapi yang dikeluarkan adalah ketika kita selesai dengan ISK, ISK ini hanya mengikuti periode dari akreditasi sebelumnya, bukan menjadi periode yang baru dari ISK. Padahal yang diakreditasi adalah TS atau tahun pada saat itu. Nah ini yang jadi masalah sehingga sekalipun kita sudah unggul misalnya dari A kemudian berpindah ke unggul itu cuma bisa 1 bulan, 2 bulan kemudian harus diakreditasi lagi. Ini jadi persoalan di banyak perguruan tinggi. Belum lagi kewajiban untuk akreditasi internasional. Ada yang namanya akreditasi ASEAN AUN ini tidak diakui oleh kementerian padahal banyak yang sudah akreditasi internasional yang seperti itu internasional yang seperti itu. Jadi regulasinya yang perlu agar supaya memang ekosistem akademiknya itu jangan bertanggung jawab lewat sistem akreditasi yang ada.

Yang ketiga perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Memang benar semua masih kami belum merasakan, kami belum BLU dan belum tahu ini tadi dijelaskan tentang PTN BH. Jadi takut juga kalau masuk ke PTN BH padahal didorong untuk supaya masuk ke PTN BH. Ini belum berani begitu sampai di situ, sebab apa Bapak-bapak? Karena ada disparitas yang sangat besar bagi kami di daerah misalnya dibandingkan dengan perguruan-perguruan tinggi yang sudah lama maju. Disparitas yang sangat besar di situ baik dari segi sistem akademiknya maupun sistem pembiayaannya sehingga kita harus berlomba mengejar ke lebih tinggi lagi. Pemingkatannya juga menjadi bermasalah karena kita harus bersaing dengan PTN BH-PTN BH (suara tidak jelas) BLU.

Yang keempat ini hak belajar yang tadi dijelaskan, hak belajar 3 semester di luar program studi. Yang sudah saya jelaskan tadi memang kita

mengeksplorasi memang kebetulan untuk lulusan yang unggul dan secara komprehensif tapi ternyata tidak saja untuk menguasai kompetensi program studinya. Berani enggak misalnya kementerian itu, pemerintah itu memberikan regulasi tidak perlu kompetensi program studi? Jadi tidak ada aturan di BAN Dikti bahwa program studi A dengan kompetensi A dosennya juga harus kompetensi A, kegiatan penelitiannya juga kompetensi A, pengabdian masyarakatnya kompetensi A seperti itu. Kampus Merdeka ini akan bermasalah sebentar ketika re-akreditasi program studi-program studi. Sebab banyak mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah-mata kuliah di luar program studinya bagaimana kita melaporkan akreditasi nanti seperti itu? Berikut.

Ini yang 20 SKS saya sudah jelaskan tadi dari awal. Dia ditambahkan dia jadi 70 SKS kemudian bagaimana kita mengonversi jumlah SKS tersebut? Ada dua dalam Kampus Merdeka yaitu kita mengikuti jalur A itu adalah mahasiswa total mengambil 20 SKS dan ada jalur B itu dikonversi. Nah persoalannya sama juga dengan tadi begitu kita mau konversi, dosennya enggak mau karena kurikulumnya sudah jalan. Begitu kita mengonversi 20 SKS itu bisa ada 6-7 mata kuliah yang dihapus sementara banyak dosen sekarang ini yang berpikir "Wah ini mata kuliah saya, kenapa mesti dihapus?". Nah kalau kita beri 20 SKS itu terjadi, kalau kita konversi maka banyak dosennya berpikir "mau dapat di mana dia teorinya belum ada kenapa dia sudah turun ke jalan? Dia sudah turun ke lapangan?" teorinya belum ada, ini jadi masalah juga sebentar. Jadi kompetensi tidak tercapai ini yang terjadi pada kita dalam satu tahun ini kita mau menjalankan program Kampus Merdeka tersebut. Berikut.

Ada tantangan dan peluang. Ini memang benar kebijakan MBKM ini telah mengubah paradigma dan praktik di perguruan tinggi yang dahulunya memang mengekang kemajuan pendidikannya. Dalam kata mengekang artinya dahulu ada dua ya. Bagi dosen dahulu dosen menganggap mata kuliah ini adalah milik saya, ini paradigma yang sama sehingga jangan campur aduk apalagi dosen senior kan? Begitu masuk di Kampus Merdeka mereka pikir "oh jangan dihapus, ini mata kuliah saya kenapa kalian mau hapus? Mau pindahkan ke 20 SKS untuk magang mahasiswa". Itu jadi masalah.

Kemudian program studi. Program studi mengekang mahasiswa untuk tidak mengambil mata kuliah di tempat lain, tapi sekarang kan terbuka maka ekosistem pendidikan diwarnai sekarang adalah merdeka, terbuka memang. Tetapi sekali lagi kita belum siap untuk itu, regulasinya belum ada, bagaimana untuk kita menyelesaikannya? Sistem kita kayaknya belum siap, PD Dikti kita kayaknya belum siap. Pangkalan data mahasiswa untuk pelaporan setiap semester juga belum siap, belum ada di dalam pangkalan data kita untuk laporan Kampus Merdeka. Sehingga kami membentuk sendiri KRS-nya Kampus Merdeka sendiri dan sistem pelaporannya bagaimana di pangkalan data? Belum ada fitur untuk kampus merdeka di pangkalan data hingga sekarang ini. Berikut.

Jadi memang MBKM ini yang dahulu homogen, hanya berpihak pada satu kompetensi saja sekarang ini menjadi heterogen. Artinya lebih komprehensif, tidak lagi parsial. Dengan cara seperti itu maka tenaga pendidik juga, dosen-dosen mestinya harus lebih pintar dari mahasiswa. Tapi sekarang ini ada *ndak* cara pemerintah untuk bisa menambahkan lagi kompetensi yang lebih pada dosen-dosen yang ada? Kalau sekarang ini dosen tua-tua semua loh.

Nah dalam 5 tahun ke depan saya tidak tahu di universitas lain. Tapi Universitas Sam Ratulangi dalam 5 tahun depan ini kalau rekrutmen dosennya tidak terbuka maka kita akan hampir 20-30% dosen pensiun semua. Sementara untuk masuk menjadi dosen baru sangat sulit sekarang ini. Memang iya sih karena ada ujian-ujian tertentu yang tertentu yang harus diselesaikan tetapi dalam 5 tahun ke depan itu 20 sampai 30% akan pensiun. Nah ini akan jadi bermasalah memang bagi banyak universitas, akan tidak terakreditasi semua program studi ketika para profesor, para doktor yang senior itu langsung pensiun. Enggak bisa, harus ada regulasi bagaimana memanfaatkan mereka. Berikut.

Nah ini kendala kita dari penjelasan saya tadi hanya ini saja bahwa tolong dipikirkan lagi tentang 144 SKS kewajiban itu mau jadi bagaimana? Kita meminta saja agar supaya ada misalnya 60-70 SKS yang menjadi SKS pilihanlah tinggal diatur oleh universitas sebentar, tidak lagi menjadi wajib yang ada di dalam pangkalan data. Sebab dia tidak bisa lulus jika pangkalan datanya tetap memblok bahwa ini mata kuliah wajib. Kalau diberi kebebasan misalnya 70 SKS dibiarkan terserah mengambil mata kuliah atau tidak maka kita kan bisa arahkan mereka ke program Kampus Merdeka dan harus juga diatur dalam regulasi BAN Dikti. Sebab masih diatur di situ total SKS untuk mata kuliah pilihan tidak boleh lebih dari jumlah tertentu, kalau *ndak* tidak terakreditasi program studinya. Ini menjadi regulasi juga yang perlu dipertimbangkan oleh BAN Dikti.

Sosialisasi memang benar, belum tersosialisasi dengan baik sehingga orang tua juga masih bingung-bingung “ini anak saya ini belajar benar *ndak*? Masuk di fakultas perikanan, belajar perikanan atau enggak ini? Sebab kok dia minta supaya magang di tempat lain?” Ini kemudian *stakeholders* juga. Ada kasus, kita tiba-tiba tinggal menerima data bahwa mahasiswa ini sudah melaksanakan Kampus Merdeka sebab di tahun lalu 2020 itu beberapa institusi kementerian yang lain mereka menjalankan Kampus Merdeka tanpa kita tahu. Sehingga mahasiswa sudah mendaftar langsung ke kementerian tertentu kita tinggal terima saja hasilnya. Tolong seperti ini tolong setiap kali ada kementerian atau institusi lain direncanakanlah dengan perguruan tinggi agar supaya kami bisa mengirim mahasiswa-mahasiswa tertentu ke situ dengan sistem yang ada di kampus sendiri, tidak langsung dibuka.

Yang ketiga yang ini khusus untuk kami di Unsrat ya kami bermasalah dengan kurikulum 2020 yang baru diputuskan dan kemudian kami harus berubah lagi atau merevisi dan memodifikasi untuk Kampus Merdeka. Tapi bagaimanapun kami mendukung untuk ke depan memang yang diperlukan adalah lulusan yang komprehensif. Lulusan yang mampu mungkin dalam

bahasa sederhana adalah kalau dia sarjana teknik atau sarjana perikanan, pertanian seharusnya dia bukan hanya tahu soal teknik tetapi dia juga harus tahu bagaimana *me-manage* keteknikannya lewat indikator-indikator ekonomi sehingga dia belajar juga ekonomi.

Dia juga bisa mengetahui bagaimana hukum, pendidikan hukum sehingga dia tahu celah-celah hukumnya, dia tahu menghindari hukum, dia tahu aturan-aturan hukum. Dia juga mungkin bisa harus lebih tahu soal pertanian kalau dia orang teknik kan ya, harus bicara soal tanah. Jadi Kampus Merdeka memang memberi peluang mahasiswa untuk seperti itu, menambah wawasan. Tetapi sekali lagi regulasinya mohon diatur lagi.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof. Grevo Gerung dari Manado ya Pak, dari Sam Ratulangi. Sekali lagi terima kasih karena banyak masukan dan lebih rinci lagi. Ini dari PTN yang BLU, jadi ini sudah lengkap ini ada dari PTN BH Rektor Universitas Diponegoro terus kemudian ini dari Universitas Sam Ratulangi. Sekali lagi terima kasih.

Selanjutnya ada Rektor Universitas Syiah Kuala, Prof. Samsul Rizal ada? Prof Samsul Rizal? Atau Pak Prof. Marwan.

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA (Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng.):

Iya Pak Pimpinan saya Samsul Rizal, Rektor Universitas Syiah Kuala.

KETUA RAPAT:

Ya silakan Prof. Syamsul Rizal.

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA (Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng.):

Sebentar.

KETUA RAPAT:

Kalau sendirian boleh dilepas Prof. maskernya.

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA (Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng.):

Iya. Terima kasih saya berapa hal yang ingin kami sampaikan. Sebentar saya mengambil presentasi.

KETUA RAPAT:

Sudah tampil ini Prof., sudah muncul di layar Prof.

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA (Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng.):

Terima kasih. Saya mau *share screen*.

KETUA RAPAT:

Oh mau *share screen* sendiri. Sudah jadi *co-host*?

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA (Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng.):

Atau yang ada di ini? Sudah ada.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bapak Pimpinan dan seluruh anggota dewan yang terhormat, yang kami muliakan.

Saya Samsul Rizal, Rektor Universitas Syiah Kuala ingin memberikan gambaran tentang Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Langsung saja Pak, ada beberapa hal-hal yang sudah kami, kita lihat bagaimana pandangan perguruan tinggi terhadap urgensi kebijakan dari Kampus Merdeka dan juga merdeka belajar yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek Dikti. Kalau kami lihat dari tujuannya sangat baik yaitu keunggulan dari program MBKM ini adalah mahasiswa seluruh Indonesia bisa berinteraksi dan saling terkait untuk pendidikan sehingga perguruan tinggi katakanlah dari mahasiswa Universitas Syiah Kuala bisa belajar di Pulau Jawa, di Kalimantan dan juga di Sulawesi dan juga sampai ke Papua. Itu yang pertama yang kita lihat.

Yang kedua mahasiswa memiliki kesempatan yang luas untuk bekerja sama dengan dunia industri jadi sehingga apa yang akan terjadi yaitu cepat *transfer knowledge*. Mereka juga bisa bekerja di industri-industri, apa yang dibutuhkan oleh industri. Yang ketiga juga mahasiswa mendapatkan banyak pengalaman untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan mahasiswa lain dari universitas lain dalam kegiatan pendidikan, magang dan lain sebagainya.

Tetapi banyak kendala yang akan kita hadapi yang pertama kita masih kondisi COVID-19 hari ini yang belum berakhir. Yang kedua masalahnya itu terbatasnya interaksi secara fisik sehingga tujuan utama dari program ini membutuhkan kontak fisik sulit tercapai. Sudah itu juga kita lihat banyak universitas mitra yang belum siap untuk mendukung program MBKM terutama sistem pembelajaran secara daring. Tidak semua perguruan tinggi, hanya beberapa perguruan tinggi yang besar yang mampu melakukan pembelajaran secara daring yang lebih baik.

Sudah itu umumnya universitas belum siap mengelola program MBKM seperti panduan akademik yang harus disesuaikan atau disinkronisasi antar sebuah perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang lain. Artinya begini juga Pak, mulai kuliah itu tidak seragam. Ada yang sudah dua kali kuliah di tempat lain satu kali kuliah. Ini yang harus kita sinkronkan. Saya ingin kementerian dalam ini harus terlibat secara langsung untuk menyinkronkan pembelajaran dari satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lainnya.

Yang keempat juga kita lihat kesiapan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM masih sangat terbatas. Ini juga lihat antara perguruan tinggi yang ada di Pulau Jawa dan perguruan tinggi yang ada di Sumatera atau perguruan tinggi yang ada di Kalimantan dan Sulawesi tidak akan sama. Sudah itu juga kami masih ada dosen-dosen yang dalam tanda kutip apakah efektif belajar dengan MBKM dari segi pengawasan dan juga mutu pembelajaran. Ini akan membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan belajar yang seperti hari ini. Karena dengan MBKM pengawasan seorang dosen itu harus datang ke perusahaan, seorang dosen itu harus melihat bagaimana seorang mahasiswa belajar di sebuah perguruan tinggi yang lain. Lanjut Pak.

Yang kami harus garisbawahi sejalan ini yakni perlu justifikasi legalitas agar kegiatan-kegiatan non tutorial di luar kampus dapat diakui sebagaimana lazimnya hasil pembelajaran tatap muka di kampus. Ini yang harus disesuaikan dengan peraturan Permendikbudristek Dikti jadi sehingga nantinya tutorial yang di luar kampus ini bisa diakui. Karena kalau enggak kami sebagai pimpinan di perguruan tinggi nantinya ke dosen-dosen yang mengajar ini akan terjadi pertentangan di dalam. Kita lanjut.

Sudah itu apakah kebiasaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejalan dengan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia emas 2045? Kalau kami melihat arah kebijakan ini sudah sangat sejalan dengan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia Emas di bidang pendidikan yang menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, serta merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Kebijakan MBKM juga berfokus untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sebagai dasar dalam peningkatan kehidupan masyarakat.

Ada perguruan tinggi yang sudah sangat baik, ada yang unggul tapi ada perguruan tinggi yang standarisasinya masih di bawah. Ribuan perguruan tinggi yang di Indonesia hari ini ada lebih dari 4 ribu perguruan tinggi tapi kualitas pendidikan antara satu perguruan tinggi dengan kualitas pendidikan tinggi yang sangat baik itu disparitasnya sangat besar. Kita harapkan dengan MBKM ini bisa menjangkau perguruan tinggi yang belum begitu baik mereka bisa belajar, anak didiknya ke perguruan tinggi yang baik. Tapi kalau ini tidak dilakukan maka disparitas ini akan terus terjadi di seluruh Indonesia hari ini.

Sudah itu kebijakan yang MBKM juga berfokus untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas sebagai dasar dalam peningkatan kehidupan masyarakat. Jadi harus ada sebuah peraturan ke Dikti yang nantinya

mewajibkan perguruan tinggi yang berkualitas untuk menerima berapa orang anak-anak dari perguruan tinggi yang akreditasi C. Kalau hanya satu level misalkan saya akan berikan contoh Universitas Syiah Kuala yang akreditasi A karena hanya kami menerima dari akreditasi A kualitas bagi yang akreditasi C tidak akan pernah naik atau program studi yang berkualitas unggul kita harus menerima mahasiswa yang bukan berkualitas unggul sehingga akan terjadi interaksi. Mungkin perlu waktu sampai 5 atau 10 tahun sehingga semua perguruan tinggi di Indonesia disparitasnya akan menurun tidak terlalu kalau pincang seperti hari ini. Sudah itu implementasinya akan berhasil sejauh proses bimbingan, pengawasan, dan pengontrolan dapat berjalan dengan baik. Kita lanjut.

Sudah itu bagaimana kajian standar pendidikan seperti standar isi pembelajaran, proses pembelajaran? Ini juga harus kita sesuaikan standar pendidikan perlu disesuaikan kembali dengan program MBKM terutama yang berkaitan dengan program MBK non tutorial yang di luar kampus. Kita lanjut. Sejauh mana keterlibatan perguruan tinggi dalam menyusun konsep kebijakan Merdeka Belajar? Apa tugas dari perguruan tinggi? Hari ini perguruan tinggi hanya terbatas pada proses implementasi yang diawali dengan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara daring. Dalam proses sosialisasi beberapa perguruan tinggi yang memberikan masukan tentang implementasi MBKM sehingga terjadi beberapa perubahan mendasar yang menyebabkan beberapa perguruan tinggi tidak mengikuti perkembangannya terlihat mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Kita lanjut.

Ini beberapa halaman saja tidak terlalu banyak. Sudah itu apakah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka bisa diimplementasi di perguruan tinggi negeri dan swasta? Kalau saya katakan perguruan tinggi negeri akan mampu kegiatan MBKM dapat diimplementasi oleh perguruan tinggi dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama manajemen perguruan tinggi perlu menyesuaikan dengan program MBKM. Yang kedua perguruan tinggi harus siap dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan program MBKM seperti sistem pembelajaran secara daring. Ini tidak semua internet kita tidak semua sama. Kami barusan internetnya putus-putus, Minggu yang lalu terjadi jaringan tidak baik yang ada di Batam dan lain sebagainya. Yang ketiga juga kita harus lihat ya kerja sama dengan dunia usaha seperti di beberapa daerah dunia usaha tidak terlalu banyak sehingga akan susah para mahasiswa untuk bisa berada di industri-industri. Sudah itu penjelasan biaya dan sarana prasarana.

Perguruan tinggi juga harus membentuk struktur pelaksana pengelolaan kegiatan MBKM. Perguruan tinggi juga harus merevisi dan menyesuaikan panduan implementasi MBKM dengan panduan akademiknya. *Alhamdulillah* Universitas Syiah Kuala sudah melakukan penyesuaian revisi panduan akademik semuanya. Perguruan tinggi juga harus mampu melakukan penyamaan persepsi internal sehingga memiliki sudut pandang yang sama terhadap MBKM. Sudah itu yang kita lihat perguruan tinggi juga harus membangun sistem koordinasi antara perguruan tinggi dengan dunia usaha untuk memudahkan implementasi program MKBM.

Seperti yang kami lakukan di BKS PTN wilayah barat itu ada kerja sama sehingga akan memudahkan. Kita sudah lakukan kerja sama lebih dari 10 tahun sehingga akan sangat memudahkan. Sebenarnya program MBKM yang disusun ini kita sudah lakukan tapi kami kekurangan dana. Apa yang kami lakukan? Yaitu setiap mahasiswa oleh perguruan tinggi antar perguruan tinggi di BKS wilayah barat itu setiap tahun kami perguruan tinggi itu harus meng-*share* BKS PTN wilayah barat itu 1 orang mahasiswa 1 orang mahasiswa 1.000 sehingga kalau ada 30 ribu mahasiswa itu 30 juta. Itu uang itu akan digunakan adalah untuk KKN, untuk pertukaran mahasiswa dan lain sebagainya tapi itu sangat kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Tapi dengan adanya program dari kementerian kami yakin dengan dana yang begitu besar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek Dikti program MBKM ini akan lebih baik berjalan. Kita lanjut.

Sudah itu ini beberapa peraturan yang saya tidak baca lagi. Kita lanjut saja, peraturannya sudah sangat. Sudah itu sebagian kebijakan MBKM dapat menjembatani keterlibatan perguruan tinggi dalam hubungan peningkatan SDM khususnya program magang, riset, dan pertukaran pelajar, proyek independen kewirausahaan dan demikian juga komitmen tinggi yang kami harapkan dari perusahaan-perusahaan. Hari ini memang kita sudah melihat beberapa perusahaan-perusahaan besar sudah menerima termasuk di DPR sendiri. Di DPR sendiri tahun ini menerima untuk mahasiswa magang dan kami sangat mengapresiasi dengan biaya yang diberikan oleh DPR RI untuk mahasiswa yang ikut dalam program Kampus Merdeka ini. Sangat berterima kasih.

Kita lanjut ini satu halaman lagi. Sudah itu kebijakan MBKM tidak sejalan dengan upaya penyediaan SDM tenaga kerja nasional yang andal dalam menjawab tantangan dunia kerja di masa depan. Karena kita akan lihat ke depan ini itu di tengah disrupsi dan revolusi industri kalau kita tidak mendidik anak-anak kita menghadapi disrupsi dunia hari ini maka mulai banyak pekerjaan yang akan hilang. Dengan adanya mereka di dunia usaha dan juga pertemuan di antara mahasiswa sehingga akan muncul talenta-talenta yang unggul untuk membangun bangsa ini ke depan. Hal ini juga akan tercapai apabila mahasiswa sesuai dengan bidangnya dan mendapat bimbingan serta pengawasan dengan baik. Halaman terakhir ini. Ini dia Pak, jadi perguruan tinggi telah berupaya untuk memodifikasi kebijakan internalnya agar implementasi MBKM dapat berjalan dengan baik antara lain perbaikan revisi dan semuanya dan juga penguatan dosen untuk implementasi MBKM.

Terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan semuanya, ini beberapa hal yang kita butuh kan ke depan. Terima kasih. Ini suaranya kami kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang jika ada hal yang mau dikonfirmasi ke kami. Oh putus, kami kembalikan ini tiba-tiba putus suaranya *mute*. Kami kembalikan ke Bapak Pimpinan Sidang. Mungkin ada beberapa hal yang mau dikonfirmasi ke kami.

KETUA RAPAT:

Universitas Cenderawasih?

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA (Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng.):

Suaranya tidak terdengar.

KETUA RAPAT:

Ah, suaranya tidak terdengar ke sana. Sudah Prof?

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA (Prof. Dr. Ir. SAMSUL RIZAL, M.Eng.):

Sudah, sudah *alhamdulillah*.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof. atas paparannya. Saya kira ini sangat bermanfaat juga buat kami untuk memberikan rekomendasi nanti kepada Kementerian Dikbud Ristek.

Selanjutnya masih ada satu ini pembicara dari Universitas Cenderawasih, Pak Victor Manengkey adakah? Pak Victor?

KETUA TIM HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH (VICTOR MANENGKEY SH., M.H.):

Baik Pimpinan Sidang.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Victor Manengkey.

KETUA TIM HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH (VICTOR MANENGKEY SH., M.H.):

Pertama-tama izinkan saya untuk permohonan maaf dari Pak Rektor Universitas Cenderawasih Bapak Dr. Ir. Apolo Safanpo S.T., M.T., Beliau tidak bisa menyampaikan secara langsung tuntutan atau permintaan dari forum ini karena Beliau ada acara karena sebagaimana kita ketahui bersama Papua sekarang itu penuh dengan tamu, persiapan PON, persiapan pembukaan PON besok. Jadi Beliau juga masuk dalam Forkompinda. Jadi Beliau minta maaf karena tidak bisa menyampaikan soal Merdeka Belajar ini permintaan dari Komisi X ini. Sebenarnya Beliau ingin sekali untuk menyampaikan materi. Beliau baru tadi saja dihubungi sehingga dari kami dari Universitas Cenderawasih tidak bisa memaparkan persoalan-persoalan yang terkait dengan keunggulan dari program Menteri Pendidikan ini menyangkut soal Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini.

Tapi barangkali nanti Pimpinan Sidang barangkali nanti Pak Rektor akan sampaikan juga mungkin secara tertulis. Itu pesan dari Beliau nanti akan sampaikan secara tertulis keunggulan-keunggulan dari proses program ini dan masalah-masalah yang dihadapi. Tapi ada satu hal yang saya kutip dari Pak Rektor bahwa memang merdeka belajar ini bagus tetapi pengaruhnya terhadap sistem yang selama ini telah dilakukan di tiap perguruan tinggi itu sangat besar pengaruhnya.

Ada satu hal yang penting untuk kita dicatat bahwa program Merdeka Belajar ini hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang orang tuanya itu punya duit. Itu pertama itu yang karena dia ketika dia magang atau di tempat di industri apa semua itu ada kaitan dengan biaya-biaya, biaya hidupnya ini penting sekali untuk orang tua yang ekonominya sederhana itu pasti akan sulit untuk membiayai. Itu pertama.

Kedua, soal pengawasan terhadap program ini itu sudah pasti akan dilakukan oleh dosen. Nah dosen ini, ini akan terkait juga dengan pembiayaannya itu. Universitas Cenderawasih ini masih dalam kategori satker, jadi kalau kita bicara satker biasanya terbatas memang. Menurut rektor apa yang kita minta ke menteri yaitu dikasih ada lebihnya kembali lagi. Ya beda lagi mungkin dengan status hukum yang ada di universitas yang lain. Ya itu problem-problem.

Universitas Cenderawasih mungkin perlu disampaikan seluruh universitas di dunia barangkali Universitas Cenderawasih itu yang paling kecil sekali SPP-nya, paling kecil sekali. Jadi ini juga kesulitan karena mau dinaikkan saja itu pasti ada problem-problem atau persoalan-persoalan dengan mahasiswa. Bukan hanya mahasiswa yang masuk, mahasiswa yang sudah di dalam juga termasuk dan warga masyarakat. Jadi itu yang jadi persoalan, Merdeka Belajar ini membutuhkan anggaran yang cukup besar dan itu hanya bisa mampu oleh implementasi hanya mahasiswa yang punya duit. Itu pertama.

Kedua, yang terkait dengan masalah Merdeka Belajar ini menurut Pak Rektor itu penting untuk dijadikan satu *pilot project* jangan langsung semua universitas atau semua fakultas atau semua program studi. Karena dalam program studi di setiap fakultas itu ada yang langsung artinya ada yang langsung untuk masuk ke industri-industri tapi ada yang masuk langsung ke pemerintah. Jadi dia bukan ke swasta arahnya tetapi pemerintah. Mahasiswa kita Papua ini itu lebih banyak mengharapkan masuk ke ini ke institusi-institusi pemerintah, jarang sekali mereka mau masuk ke swasta yang apalagi kalau sudah di industri-industri apa semua.

Jadi ini kendala-kendala yang memang dihadapi di Uncen sehingga nanti Pak Pimpinan sidang, mungkin Pak Rektor kalau berkenan nanti ke Jakarta mungkin dia akan sampaikan itu secara tertulis kepada pimpinan sidang terkait dengan keunggulan atau kelebihan dari Merdeka Belajar dan masalah-masalah yang dihadapi di Universitas Cenderawasih khususnya.

Terima kasih Pak Pimpinan Sidang. Mohon maaf.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Victor Manengkey dari Universitas Cenderawasih dan kita memaklumi mungkin kalau terlalu lama boleh juga itu ada sebagian Anggota Komisi X yang juga diundang.

KETUA TIM HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH (VICTOR MANENGKEY SH., M.H.):

Ikut dalam PON? Oke baik.

KETUA RAPAT:

Ya mungkin silakan mungkin berkomunikasi.

KETUA TIM HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH (VICTOR MANENGKEY SH., M.H.):

Baik terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ada sebagian yang ke PON ke Papua. Saya kemarin ke sana. Capeknya luar biasa.

KETUA TIM HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH (VICTOR MANENGKEY SH., M.H.):

Ya ya 5 jam itu kalau langsung Pak Pimpinan Sidang.

KETUA RAPAT:

Apa lagi harus berhenti di Makassar lebih dahulu.

Sekali lagi terima kasih Pak Victor Manengkey.

KETUA TIM HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH (VICTOR MANENGKEY SH., M.H.):

Sama-sama Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya itu kalau memang Pak Rektor berkenan untuk bisa memberikan masukan-masukan kesulitan apa saja di tulis saja saya kira ini sangat berarti buat kami kita tunggu juga Pak Victor dan mungkin kalau menunggu terlalu lama bisa saja dititipkan ke itu juga bisa atau lewat surat elektronik juga bisa. Sekali lagi terima kasih buat Pak Victor Manengkey.

Selanjutnya kesempatan buat teman-teman dari Komisi X mohon maaf mungkin kita dahulukan yang fisik lebih dahulu. Yang fisik ada dari PDI Perjuangan, silakan Mbak Esti Wijayati yang (suara tidak jelas) Jogja.

F-PDI PERJUANGAN (MY ESTI WIJAYATI):

Terima kasih Pak Fikri Pimpinan Komisi X yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Terima kasih kepada Bapak Rektor dari Undip, dari Samratulangi dan juga dari Universitas Syiah Kuala yang telah menyampaikan paparannya terkait dengan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau lebih khusus lagi tentang Kampus Merdeka. Karena dalam forum ini saya merasa justru mendapatkan informasi yang luar biasa banyak yang selama ini sulit atau belum bisa kita dapatkan dari kementerian. Tentu ini menjadi hal yang kemudian memberikan atau menjadi referensi bagi Komisi X atau khususnya kami dari Fraksi PDI Perjuangan untuk bisa menilai, untuk bisa melihat sesungguhnya seperti apa program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang saat ini sudah diterapkan.

Jadi begini Pak kami harus menyampaikan bahwa Komisi X jangan dianggap sudah tahu sepenuhnya bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Maka kenapa ada panja ini karena kami ingin mengetahui secara lebih luas bagaimana pelaksanaan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka sekaligus mengetahui hambatan-hambatan apa yang ada, nilai-nilai positif apa yang ada dan sekaligus mungkin juga apa yang perlu kami lakukan setelah kita mengetahui secara lebih utuh tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.

Dari sini kami melihat bahwa tidak semua kampus memang mempunyai pandangan yang sama tetapi ada hal-hal yang mungkin 1-2 yang itu bisa kita jadikan pijakan karena persamaan terhadap pandangan terhadap Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama saya memahami betul ketika tadi diceritakan bagaimana 60 SKS masih ditambah dengan SKS-SKS yang dari MKDU mungkin Pak ya dan yang lain-lain termasuk nanti skripsi dan yang lain-lain itu kemudian memang menjadi seolah-olah dalam gambaran saya mata kuliah yang mestinya dikuasai secara utuh di kampus terkait dengan prodinya itu menjadi sangat terbatas.

Menurut Pak Rektor apakah hal ini kemudian karena Merdeka Belajarnya tadi bisa ke mana-mana dan bahkan mungkin belum diatur kalau jurusan hukum misalnya itu bisa kampus dengan prodi apa saja. Saya tidak tahu apakah sudah diatur atau belum atau kalau di ilmu politik mereka bisa belajar magangnya di mana saja misalnya begitu. Saya tidak tahu juga sudah diatur atau belum karena yang hadir fisik adalah Pak Rektor dari Undip mungkin kami di berikan gambaran Bapak.

Kalau ini terus kita langsungkan dan kemudian belum ada pengaturan yang lebih *rigid* terkait dengan bagaimana sistem magang, bagaimana kemudian jurusan-jurusan yang boleh diambil sesuai dengan mata kuliah yang mestinya dia kuasai kemudian juga hal-hal teknis lainnya apakah memang ini bisa kita lanjut utuh seperti ini dengan harapan atau dengan

gambaran bahwa itu nanti memang akan mendapatkan mahasiswa yang setelah lulus memang berkualitas dan siap bekerja dan kemudian juga ada beberapa indikator yang memang harus kita atau dikatakan memang lulus dengan tanda kutip layak dan akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Karena kalau tidak tentu ini akan menghambat kalau sekarang sudah ada *learning loss* ya karena situasi pandemi jangan-jangan karena program ini juga nanti ada sesuatu yang *loss* dengan jurusan-jurusan yang ada.

Maka saya berharap masukan yang sangat konkret Pak dari Pak Rektor kira-kira bentuk seperti apa yang mesti kita selesaikan supaya Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini betul-betul mempunyai manfaat secara maksimal bukan sekedar ganti menteri ganti cara, lalu kemudian seolah-olah ada program baru yang bagus begitu. Tetapi betul-betul memang dalam rangka memperbaiki menguatkan sistem di pendidikan kita di perguruan tinggi.

Saya kira itu Pak Ketua. Mohon maaf. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Mbak Esti Wijayati.

Kemudian selanjutnya Pak Ferdi dari Fraksi Golkar.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Terima kasih. Perkenalkan saya Ferdiansyah dari Fraksi Partai Golongan Karya, Daerah Pemilihan Jawa Barat XI, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasik, dan Kota Tasikmalaya.

Pertama dan utamanya yang kami hormati Pimpinan dan para Anggota Panja Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Yang kedua Pak Yos Johan. Terima kasih atas objektivitas penyampaiannya dan juga tadi Pak Grevo Gerung, kemudian Pak Samsul Rizal, dan Pak Victor Manengkey.

Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih atas objektivitas data informasi yang disampaikan. Artinya Pak Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian dan Ibu Pimpinan yang kami hormati, kami Ferdiansyah Fraksi Partai Golkar sebenarnya dari paparan ini yang perlu kita kaji berarti harus ada penyamaan persepsi. Pertama dan juga tadi pengantar bahwa Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka tidak punya dasar hukum. Kemudian tidak ada kajian akademis, kemudian timbullah masalah sarana dan prasarana. Kemudian sinkronisasi prodi, kemudian pembagian beban di antaranya biaya.

Ini mohon maaf kalau misalnya di Undip jauh lebih mahal dibandingkan di UNS, nah mahasiswa UNS yang ke Undip siapa yang tanggung? Misalnya, ini mohon maaf ini. Itu juga di antaranya walaupun ini tidak satu-satunya. Kemudian juga dosen di antaranya mengenai kualitas dan kuantitas. Tentu ada lagi dosen tidak mungkin nanti dosen di sana diajar si mahasiswa sudah

levelnya rata-rata guru besar pindah ke prodi yang tertentu yang 3 semester atau dengan 20 SKS rata-rata diajar cuma lektor kepala, *down grade*. Kalau naik kelas bingung, kalau turun kelas bingung.

Yang keenam kesetaraan antara akreditasi baik itu akreditasi A, B, dan C baik itu prodi maupun lembaga. Wajar saja apabila Pak Yos Johan Utama akan mempertanyakan, justru kami akan dukung kalau apabila tiba-tiba ada sebuah universitas ingin mahasiswanya di 3 semester di Undip karena ini menjaga integritas dan nama baik Undip. Karena terbebani, satu, karena itu sekolahnya secara prodi dan lembaga di bawah Undip akan mengganggu. Pak saya orang yang terdepan akan membela Undip apabila itu terjadi walaupun saya Dapil Jabar tapi untuk demi Ibu Wilujeng dan Pak Fikri. Jadi itu Pak, saya akan membela pertama, karena apa? Tidak bisa dilakukan itu persoalan persesuaian yang tanpa belakang yang dikuat dengan secara banyak hal.

KETUA RAPAT:

Undip semuanya ini.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Iya Undip semua.

Oleh karena itu selanjutnya akhirnya kita bisa menyimpulkan program MBKM/Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah kebijakan publik yang tidak melihat publik. Jadi saya ulangi, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka adalah kebijakan publik yang tidak melihat publik dengan kata lain bahwa dikerjakan sendiri, dibuat sendiri, dan dilakukan sendiri, dinikmati sendiri. Terima kasih, ini jadi kan dibuat sendiri, dilaksanakan sendiri, dinikmati sendiri. Mohon maaf tapi bukan mohon maaf tapi benar ini.

Saya khawatir. Sekali lagi Ferdiansyah Fraksi Partai Golkar sangat-sangat khawatir apabila MBKM ini diteruskan akan menimbulkan kekacauan. Kekacauannya bukan sekarang Pak/Ibu, bukan sekarang tapi yang akan datang. Nih anak-anak masih ada enggak ini?

KETUA RAPAT:

Sudah dibawa oleh mentornya.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Kalau sudah enggak ada saya agak enggak enak nanti takut saya membuat *down grade* mereka. Ini anak-anak ini semua jadi korban, kelinci percobaan ini. Kalau kelinci jadi coba-coba di makan sate sih enak. Ini jadi kelinci percobaan yang tidak ada gunanya. Prof. mohon maaf kasihan mereka kan korban. Jadi sekali lagi kami menyatakan MBKM kalau diteruskan akan menimbulkan kekacauan. Kalau nah tadi sekian banyak harus dibereskan.

Kalau kita beranalogi, mohon maaf mungkin dengan agak sedikit menyinggung dalam konteks kehidupan sehari-hari atau kewajiban kita sebagai umat Islam mohon maaf. Ini baru salat subuh sama zuhur, disuruh salat sunah duha sama tahajud enggak benar. Salat wajib saja belum benar disuruh salat sunah, jadi begitu ya, apalagi salat-salat yang lain. Jadi itu Pimpinan secara tegas MBKM sangat banyak menimbulkan masalah, MBKM kebijakan publik yang tidak melihat publik dan MBKM kalau diteruskan akan menimbulkan kekacauan.

Terima kasih. Ferdiansyah, Fraksi Partai Golongan Karya.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Wah ini dapat baterai baru ini jadi karena Pak Rektor-rektor ini menyampaikan apa adanya tapi ini nanti kita ramu menjadi rekomendasi. Selanjutnya wah ini ada, ini terlambat jadinya keluar dahulu ini ada. Ada bernafas ya. Silakan Bang Andreas.

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Sebelum Pak Andreas nanti kami tidak perlu direspons. Maksud kami itu justru menjadi renungan Pak Yos dan teman-teman yang hadir sini.

KETUA RAPAT:

Kita dahulu atau ditampung dahulu?

F-P. GOLKAR (FERDIANSYAH, S.E., M.M.):

Ya artinya enggak usah. Pernyataan kami dan sikap kami tidak perlu direspons oleh Beliau maksudnya dari kami enggak usah direspons tapi itu menjadi catatan kita dalam kesimpulan nanti di rapat.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Oke, iya-iya.

Silakan Bang Andreas.

F-PDI PERJUANGAN (Dr. ANDREAS HUGO PAREIRA):

Terima kasih Pak Fikri.

**Pimpinan, teman-teman, Anggota Komisi X baik yang virtual maupun yang hadir secara fisik.
Pak Rektor Universitas Diponegoro.**

Pak Rektor Universitas Sam Ratulangi.
Pak Rektor Universitas Syiah Kuala yang kami hormati.

Saya lebih moderatlah melihat ini artinya lebih ingin mendengar dari yang melaksanakan langsung. Tadi Bapak-bapak sudah banyak menjelaskan artinya problematika ada pandangan secara umum bahwa ini baik artinya ini ada upaya untuk melakukan perubahan dengan konsekuensinya. Konsekuensi-konsekuensi yang kita akan hadapi atau sudah sedang menghadapi itu. Nah konsekuensi ini bayarannya mungkin cukup mahal Pak ya. Nah kalau harus dijawab dengan satu kalimat begitu Pak, apa yang harus kita perbaiki? Kalau ini kita akan melakukan sehingga ini berhasil. Kalau misalnya tidak ya juga artinya kita juga jujur mengatakan bahwa ini tidak bisa begitu artinya sulit untuk kita lanjutkan ini begitu.

Karena setahu saya pengalaman-pengalaman artinya di banyak kampus di luar. Kayak misalnya di Jerman yang saya tahu yang di mana saya juga pernah belajar di sana itu bisa dilakukan karena universitas itu diurus oleh negara begitu dan standarisasinya sama semua sehingga orang bisa belajar di sini belajar di sana. Di dalam kampus maupun pergi ke kampus lain tidak sulit begitu karena tidak ada urusan dengan urusan biaya UKT-nya karena mahasiswa tidak harus bayar uang kuliah begitu. Banyak hal yang tadi Bapak Rektor jelaskan itu, tidak tidak menjadi masalah kita di sini begitu dan mereka bisa melakukan itu begitu karena dari awal juga saya juga lihat bahwa mimpinya memang mimpi kita standar *international university* seperti yang sudah dipraktikkan di luar negeri begitu tapi memang sistem kita beda. Nah ini yang harga ini yang harus dibayar.

Nah yang kedua berkaitan dengan Badan Akreditasi Mandiri. Nah ini saya juga banyak dengar keluhan dari teman-teman di kampus seperti yang tadi Pak Rektor sampaikan, Rektor Undip sampaikan juga ini memang sangat memberatkan. Artinya kalau kampus-kampus ya karena saya juga dari kampus juga Pak dari Universitas Parahyangan mungkin tidak terlalu merasakan, tapi kalau prodinya itu banyak. Bayangkan kalau 1 prodi harus banyak 50 juta, kalau ada 10 prodi saja sudah 500 juta. Nah ini kalau terjadi dengan kampus-kampus kami di Indonesia bagian timur, di NTT, di Maluku memang tidak mudah begitu.

Nah saya ingin pandangan objektif soal ini karena selama ini kan kita yang BAN PTS ini kan dari negara-negara dan dibiayai oleh negara. Sekarang kita mau mandiri, kita mau memberikan ini kepada lembaga swasta terus mereka harus membayar begitu mahalnya. Artinya dalam ukuran perguruan tinggi swasta dengan kualifikasi yang akreditasi B, akreditasi C yang mahasiswanya baru terbatas memang ini sangat memberatkan. Saya juga melihat seperti itu begitu. Tapi saya ingin dengar langsung dari teman-teman dari perguruan tinggi negeri maupun yang sudah ya lebih punya nama apakah ini juga memberatkan atau tidak? Tapi kalau secara pukol rata baik nya yang mana begitu? Apakah kita berubah yang baru ini atau kita pertahankan yang lama?

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bang Andreas.

Selanjutnya Prof. Djohar Arifin. Silakan Prof.

F-P. GERINDRA (Prof. Dr. Ir. DJOHAR ARIFIN HUSIN):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pimpinan dan Anggota Komisi X.

Saudara Rektor.

Rektor Undip yang kami hormati yang hadir secara fisik. Ini sangat membanggakan. Kemudian rektor dari Sam Ratulangi. Rektor Universitas Syiah Kuala dan dari Uncen.

Terima kasih banyak sekali informasi yang berharga bagi kami dalam rangka memperkuat kita tentang membahas Kampus Merdeka Merdeka Belajar ini. Sejak Beliau jadi menteri banyak sekali inovasi-inovasi yang dimunculkan ya, inovasi-inovasi ini kalau dia tidak ber-*background* pendidikan boleh saja tapi pendidikan ini punya tanggung jawab besar bagaimana membangun bangsa di masa depan. Inovasi yang benar itu harus hasil dari riset ya, jadi nol tidak bagus, tidak benar inovasi itu kalau tidak ada hasil riset, jadi tidak boleh ada coba-coba. Nah ini risikonya sangat tinggi bagi masa depan bangsa tadi disampaikan oleh teman-teman.

Jadi tidak ada apa pun, kajian ilmiah tidak ada ini. Tadi saya dapat tadi pembicaraan tidak ada kajian ilmiahnya, tidak ada uji publiknya tahu-tahu menjadi keputusan. Ini harus disanggah mestinya, harus dicegah. Untuk pendidikan tidak boleh coba-coba. Kalau kita seperti saya katakan dengan menteri dalam pertemuan beberapa kali. Jika kita bikin jembatan, bikin rumah, bikin bangunan salah bisa diperbaiki tapi jika pendidikan salah yang rusak ini bangsa jadi harus disadari Beliau. Ya ini saya sampaikan bukan kepada saudara-saudara Pak Rektor yang mulia bukan tapi kepada Beliau. Jadi yang rusak ini masa depan bangsa. Jadi tidak boleh main-main dengan kurikulumnya. Kurikulum ganti menteri ganti kurikulum ini tidak boleh. Mestinya kita bangun bagaimana kurikulum negara.

Dari paparan tadi dan juga yang kita pelajari selama program Kampus Merdeka Merdeka Belajar banyak melanggar norma. Jadi yang sudah baku kemudian peraturan-peraturan banyak sekali yang dilanggarnya tidak dicabut. Jadi regulasinya pun belum ada, jadi belum siap untuk dilaksanakan. Belajar di tempat program studi lain misalnya dan sebagainya serba tanggung jadinya. Materi program di studinya tidak dikuasai semua karena dia tadi mengurangi mengambil tempat lain, yang lain pun hanya sekedar. Jadi serba tanggung. Jadi dia nanti di sini tanggung, ilmu jadi tanggung. Jadi ini harus

dicegah. Atau kalau ditambah SKS-nya tidak mungkin kan, tidak mungkin mahasiswa mau. Tapi kita dipaksakan.

Bagi perguruan tinggi negeri barangkali antar fakultas dan fakultas atau antara perguruan tinggi satu dengan yang lainnya bisa tidak mendapat masalah besar tapi PTS tidak akan mau. Anda kok tidak bayar ya jangan masuk. Jadi ini hanya tersekat yang kepada perguruan tinggi negeri itu pun tidak seluruhnya ya biayanya dari mana. Tapi kalau PTS jelas ini tidak mungkin pindah-pindah perguruan tinggi ini ke sini-sini. Jadi kalau saya lihat lagi urutannya saya berulang-ulang ini disampaikan ke Saudara Menteri dalam pertemuan kampusnya merdeka hanya slogan tapi belum Anda merdekakan.

Salah satunya pengukuhan guru besar. Penentuan guru besar. Senat Undip, senat dari Sam Ratulangi, Senat Unsyiah, Senat Uncen pasti sudah secara serius meluluskan seseorang itu jadi guru besar karena mereka paling tahu layakkah tidak Beliau menjadi guru besar adalah orang kampus itu sendiri. Tahu-tahu dikirim ke kementerian bikin tim, di sini diubah-ubah dan itu ada satu lagi sama yang satu lolos, sini tidak. Jadi sangat tidak logis ya, jadi serahkan. Kalau mereka serahkan pada, masa tidak percaya dengan senat Universitas Undip, masa tidak percaya dengan senat Sam Ratulangi, masa tidak percaya senat dengan senat Unsyiah, masa tidak percaya dengan senat Uncen. Serahkan, mereka yang paling tahu dan kalau tidak benar mereka yang akan menahankannya. Merdekakan mereka, merdekakan. Serahkan, SK-nya nanti baru dari Menteri karena kaitan dengan tunjangan.

Saya bilang lagi kampus juga belum merdeka masih Anda jajah, itu tentang penentuan Rektor. Yang paling tahu yang pantas jadi rektor adalah orang kampus itu sendiri dengan adanya senat ataupun apalah perangkat yang memilihnya tapi Anda ganggu dengan 35%. Barangkali Anda pun tidak pernah kenal dengan dia tapi Anda sokong dan dia pun barangkali tidak pernah masuk ke kampus itu menginjakkan kampus tahu-tahu jadi rektor. Jadi merdekakanlah kampus, sehingga benar-benar dengan slogan Anda biarkan mereka menentukan siapa guru besar, biarkan dia menentukan rektornya dan juga program Merdeka Belajar harus ada kajiannya ya, harus ada hasil risetnya, harus ada uji publiknya baru bisa kita jalankan. Kita tidak mau korban-korban mahasiswa kita, saya harapkan para Rektor semangat untuk menyelamatkan generasi kita.

Terima kasih. Mohon maaf.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Prof Djohar.

Selanjutnya Bang Andi dari Fraksi PKB.

F-PKB (Drs. H. ANDI MUAWIYAH RAMLY, M.Si.):

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Pak Ketua Pak Dr. Kiai Fikri dan Ibu Wilujeng.

Bapak/Bapak Ibu semuanya termasuk kawan-kawan yang di daring.

Jadi Pak Profesor Yos, kemudian Pak Profesor Gerung, Pak Profesor Samsul Rizal, dan Profesor Victor. Hal pertama yang saya tangkap dari pembicaraan kita ini adalah bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu kan tak pernah dibicarakan dengan Bapak semuanya melihat ini masalahnya enggak dari kajian ilmiahnya. Padahal yang paling tahu itu kan atau memang sangat tahu tentang hal ini Kampus Merdeka kan Bapak-bapak semua sebagai rektor. Yang lainnya itu ya *follower* saja semuanya itu termasuk kita di Komisi X ini Pak.

Baik saya tertarik sekali dengan beberapa *pointer* permasalahan yang disampaikan Pak Profesor Johan tadi. Saya catat ada 7 *pointers*. Mungkin dari sana timbul beberapa pertanyaan apakah kondisi *existing* dari 7 atau lebih *pointer* itu yang tadi ditulis lebih sudah bisa diatasi dan bagaimana cara mengatasinya? Tentu saja karena di sini cuma disampaikan permasalahannya, Bapak solusinya hanya di lisan tadi tentu saja itu perlu kami kompilasi lagi dengan baik Pak ya. Terima kasih. Mungkin di sana diperlukan regulasi dan untuk regulasi itulah nantinya kami di Komisi X Pak Fikri ini untuk panja ini dibentuk. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Karena ini bukan masalah teknis, tapi substansi ini tentang bagaimana memerdekakan pelajar kita. Itu yang pertama.

Kemarin saya mau cerita di sini kemarin Pimpinan kita Pimpinan Komisi dan ada juga Pak Profesor Tengku Johar dan saya menerima Pak ini sekedar informasi karena Bapak tadi ada menyebut tentang usulan untuk prodi baru. Ada universitas sangat baik di Makassar namanya UIM Universitas Islam Makassar berdiri sejak 1966 membuka 8 prodi. Jumlah mahasiswanya sekarang ini karena COVID-19 banyak tidak mendaftar kembali sudah 8.003 orang, jumlah dosennya ada 250 orang. Disampaikan kepada kita bahwa kampus ini dengan kampus sangat megah, lebih megah dari kampus Syiah Kuala tadi.

itu di bawah Yayasannya Pak JK ketuanya, Pak Jusuf Kalla itu ingin membuat membentuk untuk prodi baru namanya fakultas kedokteran, itu sudah 11 tahun Pak diusulkan dengan segala kesiapan yang sudah dibuat. Proposal bolak-balik tapi ternyata belum pernah divisitasi oleh (suara tidak jelas). Mereka terima itu *ndak* bisa karena ada moratorium. Tapi hal yang aneh di sebelah Kota Makassar ini namanya Kabupaten Gowa baru 1 tahun dibentuk sudah keluar prodinya Pak. Ini masalahnya apa ini? Regulasi atau penganaktirian? Ini saya sampaikan laporan ini juga pada Pimpinan, Ibu Wilujeng mungkin nanti risalah rapatnya bisa disampaikan kepada pimpinan untuk masukan kepada kita semuanya.

Ada lagi persoalan baru kampus ini kan punya 250 orang dosen dengan lebih 60% doktor sebagian profesornya itu kemarin 8 orang datang ke sini menemani Ibu Dr. Majdah rektornya. Persoalannya setiap tahun dosen-dosen ini dijadikan pegawai negeri, PNS suruh meninggalkan kampus apalagi sudah sejak lama diampu oleh universitas ini dan tidak dikembalikan untuk mengajar, itu jadi persoalan ini Pak. Kita kan selalu mengatakan enggak ada bedanya antara swasta dengan negeri kan Pak tapi dalam hal seperti itu pemberlakuan seperti itu diminta dosen itu kembali ya Pak Prof. tapi tidak dikembalikan itu untuk mengajar kembali di kampus mereka mengabdikan selama ini kalau sudah menjadi PNS. Itu yang untuk Profesor Yos sekedar *highlight* apa yang disampaikan tadi.

Tentu saja yang sesungguhnya saya minta itu tadi Profesor Samsul Rizal. Kita sudah siap melaksanakan ini semua. Beda sekali Pak yang lainnya kan banyak permasalahan tadi sudah siap melaksanakan. Bahkan tadi disebutkan juga dari satu lagi Universitas Sam Ratulangi ini Pak Profesor Gerung ada kendala permasalahan nomor 3, Unsrat baru saja menggunakan kurikulum 2020. Pak yang namanya kurikulum 2020 belum tahu kita asal-usulnya di Komisi X ini. Jadi kita enggak tahu itu apa-apanya itu akarnya pucuknya apanya itu tiba-tiba Bapak sudah laksanakan di sana ya *alhamdulillah* tapi pasti terkendala beberapa masalah. Karena kami sendiri yang bermitra dengan Kemendikbud Ristek belum tahu masalah namanya kurikulum dari 13 menjadi kurikulum 20 itu apa itu Pak Fikri? Itu yang saya ingin sampaikan.

Yang ketiga tentu saja kembali ke berapa menuju kepada Profesor Victor dari Unsyiah, 1 menit lagi Pak, tidak sampai 1 menit. Tadi disampaikan bahwa banyak permasalahan di sana ada persoalannya dan tidak bisa dilaksanakan karena terbentur masalah dana. Jadi sekali lagi kembali kepada Kampus Merdeka ini di mana dibentuk tidak memperhatikan geografis, bagaimana dari satu kabupaten ke kabupaten lain mau pergi seperti adik-adik kita sekarang ini kita harus pakai pesawat Pak. Ya betul Pak saya kuliah di sini (suara tidak jelas) tidak memperhatikan namanya kultural, ekonomi, sosial, betul-betul enggak ada kajian ilmiahnya pokoknya laksanakan saja. Ini enggak tahu ke mana arah pendidikan ini.

Jelek jelek begini Pak sedikitnya juga, saya ini pembelajar S1 filsafat UIN Sunan Kalijaga, S2 di UNJ Jakarta, tambah lagi S2 lagi dan belajar betul bukan beli ijazah itu Pak di kampus lain belajar. Pernah juga sekolah di Jepang selama 2 tahun. Saya *ndak* menemukan sistem pembelajaran seperti yang Kampus Merdeka dengan yang kami alami tadi apa ini. Apakah betul-betul mahasiswa atau siswa kita nanti bisa mencapai tujuannya untuk mencapai SDM atau tidak. Ini justru bukannya menanjak tapi kita landai dengan melihat apa yang terjadi sekarang ini, *existing* ini.

Saya pikir ini bagian curhat-curhat antara kita dan saya melihat pemikiran di sini betul-betul dari Bapak Rektor semuanya ini bukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan bebas merdeka bicara, betul-betul bisa bicara di sini. Mudah-mudahan Pak Fikri sebagai Ketua Panja atau apa bisa kita rumuskan ini Pak. Kita ini kan biasanya kalau ke dapil belanja masalah, nah

sekarang ini Beliau-beliau ini menjual masalah sama kita ini, menjual masalah Pak Rektor sama kita ini. *Alhamdulillah*. Itu saja yang disampaikan, Pak Fikri.

Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Bang Andi Muawiyah Ramly dari Fraksi PKB, daerah pemilihannya Sulawesi Selatan II. Sebelumnya di Jawa Timur, rupanya sekolahnya di Jogja tadi. Pokoknya sudah memutarlah Prof.

Masih ada satu lagi yang fisik ini Ibu Ledia Hanifa. Silakan Ibu.

F-PKS (Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSi.T.):

Baik terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan dan Anggota Komisi X dalam hal ini Anggota Panja MBKM Serta para tamu narasumber kami Prof Yos dari Undip, Prof Samsul, kemudian tadi dari Unsrat dan juga Pak Victor.

Senang sekali hari ini para narasumber secara tadi bahasanya Pak Ferdi itu secara objektif menyampaikan karena kalau cuma isinya puja/puji enggak jelas itu nanti kasihan nasibnya anak-anak kita ya. Jadi persoalan yang sangat besar karena kalau kita cuma bikin *website* katanya kan mau pakai teknologi kalau itu bisa misalnya ternyata gagal kita masih bisa tinggal tulis saja "*sorry this is under construction*" habis itu dibenarkan terus bisa. Ini kan manusia, enggak bisa dibegitukan begitu. Artinya memang tanpa ada riset yang mendalam fatal akibatnya. Memang tidak bisa disamakan dengan ketika kemudian kita membentuk satu program aplikasi dan lain sebagainya. Ini manusia yang kompleks yang variabelnya itu sangat banyak.

Saya sebetulnya jadi penasaran ini Prof. kan setiap mata kuliah itu kan didesainnya berjenjang ada *prerequisite* kan. Saya S1 kimia jadi kalau mau ambil kimia organik 2 harus ambil kimia organik 1. Terus ambil kimia organik 1 begitu lihat kimia organik 2 dosennya *killer* pindah ah kampus lain begitu kan bisa begitu jadinya, padahal ada hal-hal yang di harus kuasai. Keinginannya adalah melompat supaya mahasiswa nanti bisa melompat. Melompat kalau pijakannya nggak kuat jatuh, seenggak-enggaknya keseleo begitu kan. Kalau enggak patah kakinya *nauzubillahminzalik* serem banget kan begitu.

Kalau kita lihat ini ada bagian-bagian yang harus betul-betul diperdalam sesungguhnya idealnya. Ini kan *given* kan dari Kemendikbud, 20 SKS semua bisa dipelajari di prodi lain. Padahal masing-masing kampus,

masing-masing program studi punya kekhasannya masing-masing. Kalau bicara soal boleh mengambil di prodi lain mohon maaf saya tidak mewakili orang tua mahasiswa karena sudah enggak punya mahasiswa di rumah. Tapi anak-anak saya waktu di angkatan 2010 saja di UI boleh belanja mata kuliah di fakultas lain dengan sejumlah syarat yang sudah disampaikan.

Jadi bukan persoalan baru, bisa mengambil, boleh. Jurusannya komunikasi dia mau ambil bahasa isyarat enggak bisa dia ambil jurusan yang lain, boleh bisa begitu tapi kan itu sudah *clear*. Ini yang dasarnya selesai semua. Karenanya ketika kemudian mata kuliah pilihan itu dia bisa. Masalahnya sekarang ini beredar di kalangan mahasiswa kita mestinya kan kalau sudah pilihan itu sudah di semester 7. Semester 5 sudah pada pengen ambil magang ah magang ah bisa ke luar negeri apalagi yang bisa keluar negeri itu kan. Bisa ambil mata kuliah di luar negeri. Ini kan jadi tidak jelas dasarnya. Saya agak khawatir pijakannya.

Yang pertanyaan berikutnya karena ini tadi dibolehkan mengambil, apakah tidak ada penjelasan tentang gambaran lengkap program studi tersebut? Misalnya kita masuk jurusan teknik elektro, gambaran besar tentang teknik elektro itu yang dibuat desain mata kuliahnya itu seperti itu adalah karena punya target-target tertentu. Ada enggak sih? Zaman saya kuliah dahulu sih enggak ada kita enggak dikasih tahu begitu nanti itu akan seperti apa karena ini kan pendidikan orang dewasa biasanya kan harusnya dikasih tahu nih tujuannya nanti mau begini kamu akan mendapatkan a, b, c, d. Ketika itu tidak ada terus tahu-tahu dikasih kan, zaman sekarang itu ya bisa menyebarkan ilmunya.

Saya saja S2-nya psikologi Prof. jadi saya harus matrikulasi dahulu. Nah ketika ini mengambil tanpa matrikulasi konsep dasar mata kuliah pilihan yang diambilnya tanpa ada pemahaman dasar kan jadi *ambyar* begitu loh. Saya enggak tahu apa namanya lagi sudah enggak jelas sudah mangkelya. Ini bagaimana sih mau diapakan anak-anak kita? Bahkan kemudian ketika bicara soal magang, saya menerima mahasiswa magang sebagai anggota DPR RI sejak tahun 2012 jurusan ilmu politik. Saya tanya sama dosennya saya kontak langsung sama dosennya ketika “menitip ya Mbak”, ya menitip. Terus ini targetnya apa? Enggak ada targetnya. Oke saya diizinkan ya bikin target sendiri. Ini anak magang sama saya targetnya saya mau bikin sendiri. “ya boleh silakan”.

Nah sekarang ini mohon maaf ya datang ke DPR sebegitu banyak itu ada 80 anak terus datangnya itu menonton. Menonton ini saya bilang bukan magang, menonton di Komisi X, menonton di Baleg, menonton di Paripurna, menonton di mana-mana begitu. Kan katanya magang itu mau latihan kerja, enggak dapat apa-apa. Betul kan? Cuma dapat *nobar*. Jadi lulusannya sertifikat *nobar* nanti, rugi kan kalau kayak begitu, kasihan anak-anaknya begitu. Begitu, kimia rasa sastra. Jadi kita bisa bayangkan semestinya setidaknya meskipun tidak *inline* sudah ada kerangka mau ambil prodi orang di tempat lain itu harus ada kerangkanya, di sini ada kerangkanya. Sehingga nanti memang betul-betul bermanfaat, tidak ke sana ke sini akhirnya setengah

jadi begitu. Pak boleh dimatikan juga enggak apa-apa kok Pak, masih panjang.

Jadi terakhir, sudah di-beker soalnya ini. Jadi Komisi X itu pakai beker Pak kayak membangunkan orang tidur. Jadi kalau saya lihat persoalan ini mau ambil di kampus lain adakah kampus asal diajak bicara tentang metode konversinya, keberlangsungan ilmunya, target yang akan dicapai? Sebab begitu bicara soal urusan sekolah di luar negeri, siapa yang enggak mau? Sekolah luar negeri meskipun cuma 3 semester kan dibiayai negara, lumayan dapat pengalaman ke luar negeri. Tapi ke secara keilmuannya *construct* berpikirnya enggak dapat dan ini sebetulnya yang menyebrang.

Tapi saya tidak melihat bagaimana kita mau memiliki peneliti yang andal, kan dasar ilmunya harus kuat. Peneliti *science* teknologi itu kan runtut dia harus runtut enggak bisa dong lompat-lompat. Kedokteran sudah jelas enggak mungkin, perawatan juga enggak mungkin, bidan apalagi. Entar lahir dahulu apa hamil dahulu begitu kan enggak mungkin begitu, kan ada aturan-aturan yang memang ketika kita lihat bab *prerequisite* ini harusnya diajak *ngomong* kampus asal. Cuma pertanyaan saya anak mau mengambil itu ditanya enggak sih kampusnya itu? Terus adakah misalnya semacam kesepakatan kalau mau mengambil di kampus itu yang boleh diambil mata kuliahnya apa saja supaya nanti menyambung dengan yang dia sudah dapatkan dan dia kira-kira akan memanfaatkan ilmunya nanti seperti apa?

Saya agak khawatir *construck* berpikir tidak terbentuk lantas kemudian katanya dia dapat pengalaman. Pengalaman sebetulnya bisa saja didapat tidak lagi dia harus mengambil mata kuliah tapi kan bisa semester pendek segala macam itu kan itu sesuatu yang bisa dilakukan. Nah ini bagian-bagian yang saya ingin tahu dari para pemangku kepentingan dalam hal ini kampus agar kita tidak memberikan catatan buruk dalam riwayat hidup seorang mahasiswa yang nanti kemudian ternyata berimplikasi buruk di masa yang akan datang *nauzubillahminzalik*.

Demikian saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Ledia Hanifah Dapil Jabar I, Kota Bandung, Kota Cimahi.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Ledia dari Fraksi PKS.

Waktunya sudah habis tapi mungkin ada yang belum salat silakan salatnya ganti saja. Saya tidak akan nge-*break* skors. Prof. Yos mungkin sudah dijamak ya? Sudah di awal ya Prof.? Sudah. Jadi saya tenang nanti saya enggak dosa. Tapi ini ternyata ada yang karena dibilang ada rektornya akhirnya hadir Prof. ini. Ini mantan rektor juga Prof, jadi muridnya tapi mantan rektor di Universitas Abulyatama ya? Malahayati di Lampung. Mas Dr.

Muhammad Kadafi lulusan Undip S3-nya, Undip ini. Kemudian dari Fraksi PKB, Daerah Pemilihannya Lampung. Silakan Mas Kadafi.

Oh ya diperpanjang dahulu sampai jam 17.00 WIB ya? Sampai jam 17.00 WIB.

(RAPAT: SETUJU)

F-PKB (Dr. H. MUHAMMAD KADAFI, S.H., M.H.):

Baik.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat sore.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan.

Terima kasih Pimpinan dan beserta seluruh teman-teman Komisi X.

Yang saya banggakan dan juga saya hormati selalu ini orang tua saya ini Prof. Yos Johan.

Ini Beliau ini yang memberikan kisi-kisi wah ini Mas Dafi ini doktor tanah khusus bencana karena saya menulis tentang rekonstruksi kepemilikan tanah pasca tsunami di Aceh.

Kemudian juga *alhamdulillah* hari ini juga saya bisa bersilaturahmi dengan Prof. Samsul Rizal.

Ini juga sahabat dan orang tua saya, teman diskusi di Aceh yang selalu memberikan masukan-masukan.

Kemudian juga ada Grevo Gerung dan juga seluruh para narasumber yang cukup luar biasa.

Jadinya yang pertama yang ingin saya tanyakan baik itu kepada yang saya ketahui bahwa di Undip maupun juga di Unsyiah itu ada prodi vokasi. Tentunya Dirjen Vokasi telah punya arah kebijakan yang cukup jelas yang ingin Beliau inginkan dan juga harapannya berkenaan dengan vokasi. Nah yang ingin saya tanyakan relevankah harapan dan target dari Ditjen Vokasi dengan kampus-kampus yang pendidikan vokasinya di bawah universitas kan berbeda dengan pendidikan vokasi di sekolah-sekolah tinggi maupun juga yang lain-lainnya. Ini yang ingin saya tanyakan karena akan berbeda yang satu sisi lebih kepada keilmuan yang satu sisi lebih kepada *skill*-nya.

Kemudian juga tadi disampaikan banyak hal yang kita ketahui ini kampus-kampus hebat semua. Nah kalau kampus-kampus hebat saja seperti itu penyampaiannya bagaimana lagi kampus kampus swasta? Kemudian juga yang perlu kita ketahui bersama ada PR besar ternyata di kampus ini ada

aturan yang membatasi para dosen untuk melanjutkan pendidikan yang disampaikan oleh Prof. Yos tadi 40 tahun itu sudah enggak boleh. Ini kan yang enggak sesuai dengan semangat belajarliah hingga kamu ke liang lahat, ternyata apa? Dibatasi dengan undang-undang ini menjadi PR bersama yang harus kita kaji kembali.

Kemudian juga berkenaan dengan yang disampaikan tadi 20 SKS, saya juga bingung begitu. Sebenarnya selama ini juga kampus-kampus sudah melakukan Merdeka Belajar seperti halnya apa misalnya kayak kita mengambil hukum habis itu baru kita memilih mau itu internasional kah, mau hukum pidana kah, perdata kah, perdata ekonomi ataupun hukum kesehatan begitu. Itu kan di luar keilmuannya semua, nah ini kan sudah dilakukan sebenarnya. Kalau dia dilompatkan dari rumpun ilmu yang cukup jauh nanti lulusannya juga kita akan sedikit meragukan. Tadi kan disampaikan dalam nomenklatur saja penerimaan CPNS saja berbeda sedikit saja itu akan menjadi permasalahan apalagi nanti dia lulusan sarjana apa juga bingung kita begitu. Ini yang menjadi catatan. Nanti bagaimana skripsinya? Ini jadi PR lagi ini, skripsinya nanti menulisnya tentang apa? Kan begitu, yang mengujinya siapa? Nah ini menjadi catatan.

Kita pahami bersama bahwa nanti begitu dia dari okelah kalau dari Undip akan magang ke kampus swasta yang akreditasinya sama atau di bawahnya ya yang swasta senang-senang saja tetapi Undip mengakui enggak keilmuannya? Anak-anaknya dari prodi akreditasi A mereka magang di kampus prodinya akreditasinya B ataupun mungkin baru begitu masih C. Nah ini seperti dalam menghitung atau pun juga mengonversikan nilainya ini juga menjadi perdebatan nantinya.

Kemudian yang perlu kita ketahui bersama, ini ingin saya sampaikan tadi dikemukakan bahwa pangkalan data Dikti pun itu masih permasalahan sampai hari ini. BAN PT terkadang datang itu akreditasi itu dengan data yang enggak *uptodate*. Datang ya maaf *ngomong*, hari ini apa yang dilakukan oleh BAN PT harusnya itu bukan seperti polisi, mereka itu memberikan pembinaan, pengawasan dan evaluasi bukan seperti polisi begitu mencari-cari kesalahan dan datanya enggak *update* pula begitu. Nah ini menjadi permasalahan.

Perlu kita ketahui para pimpinan bahwa akreditasi itu enggak gratis, prodi-prodi itu akreditasi kalau di Lampung itu satu prodi itu bayar sekitar 70 juta, jadi bukan gratis. Nah kalau sudah datang bayar 70 juta dapatnya turun akreditasinya, apa enggak mangkel? Kalau satu universitas itu kalau punya berapa prodi hitung saja berapa biaya akreditasinya. Ini menjadi catatan kita bersama. Kemudian apa? Sekarang itu di kampus-kampus sini civitas akademika itu sekarang sudah dibebankan kita itu ke standar 9, ya kan dari standar 7 ke standar 9 naik standarnya. Ini tambah lagi Kampus Merdeka ini menjadi masalah lagi. Standar 9 saja baru digolkan kok jadi tambah Merdeka Belajar ya tambah runyam lagi Pak Fikri. Jadi dari standar 7 saja kita geser ke 9 itu tahu sendirilah itu sakit kepalanya minta ampun ditambah sekarang tambah lagi Kampus Merdeka. Sedikit Pak Fikri saya 1 menit lagi.

Kemudian belum lagi berkenaan dengan penelitian internasional tadi disampaikan oleh Prof. Yos Johan. Beliau saja mengeluarkan itu 1 miliar ke mana lagi kampus-kampus swasta? Ini menjadi catatan kita bersama berkenaan dengan *scopus* dan sebagainya. Kok kita ini dari awal kita masuk kita bicara berkenaan *scopus* sampai hari ini kok belum ada titik temu, padahal kan bisa saja dilakukan kajian penelitian berjenjang, kan bisa saja itu.

Kemudian juga iya kan ada masalah lagi berkenaan dengan kalender akademik, ini kan juga bermasalah. Tadi disampaikan oleh Prof. Samsul bahwa kampus-kampus berbeda apalagi swasta wah itu kampus akademiknya pasti akan mundur. Ini beberapa hal yang memang harus kita evaluasi bersama berkenaan skripsi saja ini jadi catatan. Dahulu itu di Kedokteran itu boleh mereka berbasiskan kepada penelitian ternyata ada asesor enggak mau, maunya harus ada skripsinya. Nah ini pemahaman sama asesor pun juga belum selaras begitu. Nah ini menjadi catatan kepada kita semua mudah-mudahan dari masukan yang cukup luar biasa hari ini dan juga mudah-mudahan nanti juga masukan dari yang lain-lainnya bisa memperkaya dan juga bisa memberikan usulan kita kepada pemerintah berkenaan dengan Kampus Merdeka ini. Terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Apakah masih ada yang di virtual? Ini dari meja Pimpinan saja dahulu ini karena merasa sama dengan Mas Dafi alumni Undip, jadi IKA Undip katanya. Silakan Mbak Agustina Wilujeng Pramestuti dari Fraksi PDI Perjuangan Wakil Ketua Komisi X, Daerah Pemilihan Jawa Tengah IV. Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen. Ya silakan.

PIMPINAN KOMISI / F-PDI PERJUANGAN (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.):

Fit and proper hakim agung. Amin. Terima kasih.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om swastiastu.

Namo buddhaya.

Salam kebajikan dan selamat sore.

Prof Yos. ini senior, guru, sahabat, teman pokoknya komplitlah bagi saya.

Jadi Undip itu memang di Komisi X ini rata-rata semuanya pernah sekolah walaupun S2, S3. Sebelah saya ini kelihatannya sama, S3. Saya juga

sedang kembali ke Undip. S2-nya saya sempat membuktikan bahwa walaupun saya katolik saya bisa lulus S2 di sebuah universitas Islam terbesar di Jawa Tengah Unissula dan saya lulus. Namanya juga aneh jurusannya juga manajemen sumber daya manusia, dari sastra, ekonomi, sekarang kembali lagi S3 di sejarah, sejarah parlemen.

Prof. Yos yang saya hormati dan saya banggakan.

Ada tadi Prof. Grevo Gerung.

Kemudian dari Syiah Kuala, Prof. Samsul Rizal.

Dari Cenderawasih tidak hadir tadi ya? Ada Pak Victor.

Saya *missed* karena ada berapa hal terutama hari ini karena ada senior partai kita yang meninggalkan kita Pak Sabam Sirait yang kebetulan juga adalah mertua dari Mas Putra Nababan, salah satu Anggota Komisi X. Maka teman-teman di PDI Perjuangan ini bergantian jadi agak siangan teman-teman satu *trip*, ini yang kedua sudah juga, nanti yang terakhir saya untuk bisa sekedar memberikan salam dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan.

Prof. dan teman-teman yang kami hormati.

Jika ditilik dari dasar seluruh tindakan mengenai pendidikan di Indonesia ini sebenarnya regulasinya di tataran konstitusi maupun perundang-undangan cukup. Hanya di tataran teknis pelaksanaannya itu ketika rezim berganti sistemnya juga berganti. Tadi dari Prof. Grevo Grung mengatakan periode sebelum ini sedang kita menyelesaikan kurikulum tentang persiapan era 4.0, belum selesai tingkatan teknisnya kemudian tiba-tiba kita berganti menjadi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Nah saya kira risiko rezim berganti sistem berganti itu yang harus diubah kebalikannya supaya rezimnya tidak usah berganti sehingga sistemnya kan tidak berganti-ganti, boleh dong. Ya maka dari itu memang ketika ada pergantian sistem ya yang menjadi korban adalah anak-anak. Disampaikan sangat lantang berkali-kali dan terus-menerus oleh Prof. Djohar Arifin ini. Bikin jalan bikin jembatan kalo rusak bisa diperbaiki, kalau yang rusak itu anak-anak kita, enggak bisa diperbaiki lagi. Maka dengan logika seperti itu harus sepakat rezimnya enggak usah diganti, maaf ya Mas Fikri. Ini *refresh* supaya tidak tegang.

Kemudian kalau soal Merdeka Belajar ini Mas Menteri membuat berbagai macam terobosan, menjawab tantangan, kritik tentang dunia pendidikan yang dilaksanakan sampai dengan sebelum Beliau menjadi menteri. Banyak hal dilakukan dan saya kira apresiasi juga banyak samping juga kritik dan demonstrasi bahkan itu juga cukup banyak. Itulah risiko dari sebuah perubahan dan penyesuaian. Hari ini Komisi X membuat Panja Merdeka Belajar yang di luar panja tidak paham, anggota komisi yang di luar panja *ngapain* sih bikin panja kayak begitu. Tetapi kalau kita yang di dalam panja justru sangat kemudian mendalami dan memahami apa sih kurangnya? Kekurangan paling besar daripada program Merdeka Belajar ini adalah regulasi. Bagaimana seorang menteri melancarkan sebuah program,

mencanangkan sebuah program tetapi bawahannya tidak mengikutinya dengan berbagai macam perubahan regulasi.

Tadi yang disampaikan Mas Kadafi, lompatan pengambilan mata kuliah Merdeka Belajar itu apakah bisa semena-mena diambil oleh mahasiswa? Misalnya mau membangun desa, terus mengajak beberapa sahabatnya dari berbagai fakultas misalnya siapa yang mau meng-*assist*? Nah itu mestinya adalah dibuat regulasinya secara detail, disosialisasikan oleh Dirjen Dikti misalnya. Tapi ini tidak ada data maupun surat maupun proses persiapan yang meluncur, kenapa? Karena sebagai insan politik saya melihat jawabannya sebenarnya adalah Mendikbud ini sedang mendobrak sebuah kebudayaan yang sudah menahun. Tentu dalam proses dobrakan itu berpotensi mengganggu regularitas yang berjalan. Yang menjadi korban tentu adalah pihak kampus dan mahasiswa.

Tetapi bahwa perubahan ini mau tak mau pasti terjadi, Komisi X pun menyadari itu. Maka hal pertama ketika Mas Menteri duduk dan membuat Merdeka Belajar adalah peta jalan pendidikannya harus dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diikuti dengan baik. Peta jalan pendidikan itu tidak bisa dipakai kalau undang-undang tentang sistem pendidikan nasional juga tidak diubah. Sampai pada kesepakatan waktu itu siapa yang akan mengajukan RUU tentang Sisdiknas? Komisi X siap. Dengan kekuatan Komisi X hari ini bisa minta Prof. Yos, Prof. Grevo Gerung, Prof. Marwan, semua profesor untuk membantu membuat naskah akademik berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tetapi Mas Menteri mengatakan setelah berkoordinasi dengan lembaga/kementerian yang lain dan atas arahan presiden itu akan disiapkan oleh pemerintah. Baiklah, sayangnya kita lupa membuat tenggat waktu ya Mas Fikri sampai kapan pemerintah akan mengirimkan draf RUU mengenai Perubahan Sistem Pendidikan Nasional.

Ibu Ledia tentu salah satu Anggota Komisi X yang sangat gencar menyatakannya di Baleg karena Beliau juga Baleg, jangan sampai di Prolegnas ini prioritas 33 itu RUU tentang Sisdiknas tidak lolos. Tetapi memang drafnya sampai hari ini belum bisa kita terima padahal proses belajar mengajar tidak bisa dihentikan maka akibatnya seperti ini. Itu kira-kira analisa saya terhadap sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam proses pelaksanaan program Merdeka Belajar.

Hari ini kita punya anak-anak magang ada 200 slot, Undip banyak Prof. Keluhan mereka adalah bahwa mereka enggak bisa konversi. Pada proses wawancara karena saya menginisiasi jadi saya merasa bertanggung jawab. Ketika ditanyakan bahwa mereka tidak bisa konversi mereka tetap ikut. 17.000 yang mendaftar Prof. untuk bisa magang di kantor DPR ini. Kewalahan teman-teman di Panja Merdeka Belajar untuk memilih hanya 200 orang, 150 ada di DPR, kemudian yang 50 itu ada pusat data dan informasi karena diminta untuk membuat *big data* mengenai ke DPR-an.

Kemarin saya dengan Mas Menteri bertemu dengan anak-anak itu. Proses penyerahan dari kementerian ke DPR. Saya sempat mewawancarai beberapa anak apa kabarnya? Mereka *exciting* luar biasa, *excitement* itu

mengalahkan perasaan bahwa mereka tidak bisa mengonversi mata kuliah bahkan ada yang 0 benar-benar, apalagi kok pikir 20, enggak 0 sudah, enggak bisa ya enggak apa-apa yang penting saya bisa magang. Nah itu Pas bertemunya adalah tempat magang lembaga seperti ini. Kalau bertemunya magang kemudian misalnya teknik elektro ada di sebuah bengkel yang kecil kan (suara tidak jelas) kasihan.

Jadi harus dilihat dari berbagai macam sisi bahwa sebenarnya program Merdeka Belajar ini satu sisi membuat mahasiswa itu merasa benar-benar merdeka dalam belajar. Kemerdekaan yang mereka pahami mungkin berbeda konsep dengan kemerdekaan yang oleh kita orang-orang tua pahami, berbeda juga konsep merdekanya dengan yang harus disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang sudah berjalan, dengan sistem dan budaya masyarakat yang sudah berjalan. Nah inilah tugasnya Kemendikbud.

Kalau konversi 20% SKS untuk sebuah program studi yang ditawarkan oleh menteri terlalu banyak saya kira. KKN saja berapa Prof.? 4 ya? Oh 3 malah. Skripsi saja yang dengan beban berat yang demikian itu hanya 2 ya? Oh 6. Belum 142 termakan MKDU, kewajiban mahasiswa untuk tetap belajar Pancasila, untuk tetap belajar Bahasa Indonesia mungkin, belajar mengenai kewarganegaraan, belajar mengenai ilmu-ilmu dasar atau mungkin bukan belajar tapi diukur kemampuannya misalnya soal matematika dan lain sebagainya. Maka saran saya harus masuk di dalam salah satu rekomendasi kita supaya ada perubahan jumlah konversinya Mas Fikri.

Tiga semester boleh tetapi konversi 20 SKS saya kira *too much* ya terlalu tinggi. Apa mau disamakan dengan KKN mungkin? Oke. Tetapi siapa yang membuat mahasiswa ini bisa di-ACC untuk mengikuti program yang dipilih itu juga harus disiapkan dan itu pasti mengandung sebuah biaya. Sebelumnya mengandung *effort* dari kementerian untuk mengeluarkan segala macam peraturan teknis, mengandung pelatihan, mengandung kesepahaman bersama antara para dosen seluruh Indonesia.

Saya kira itu hal yang ingin saya sampaikan Mas Fikri. Terima kasih waktunya. Saya juga sangat terima kasih kepada para profesor yang mau ini kan ribet banget ya tapi memberikan berbagai macam pendapat yang bisa membuka pikiran kita yang hari ini menjadi sangat bersyukur dengan adanya paparan-paparan yang diberikan kita menjadi sangat paham, bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini masih banyak bolongnya dan masih harus direvisi dengan kecepatan yang penuh. Karena anak-anak itu setiap hari belajar tidak bisa dihentikan untuk menunggu program ini menjadi sempurna. Terima kasih.

Wabillahittaufig wal hidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Mbak Agustina Wilujeng.

Cuma terus sudah diperpanjang habis juga waktunya. Tapi masih ada yang ini WA ini Ibu Wakil Ketua Komisi X Ibu Hetifah minta meskipun hanya 2 menit katanya. Mohon maaf Prof, mungkin dan terima kasih atas kesabarannya. Ya sekali-sekali jadi pendengar juga Prof. Silakan Ibu Hetifah.

PIMPINAN KOMISI / F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):

Terima kasih Pak Fikri, Ibu Agustina.

**Teman-teman Pimpinan dan juga Anggota Komisi X.
Tentu saja para tamu-tamu terhormat.**

Rasanya kalau tidak menyapa dan menyampaikan salam hormat saya merasa sangat tidak sopan karena hari ini saya beruntung bisa hadir dan menyimak dari awal hingga akhir walaupun melalui virtual dan banyak sekali informasi maupun tadi keterbukaannya sangat kami apresiasi. Ini sangat valid ya Pak Fikri karena betul-betul disampaikan berbasis pengalaman langsung teman-teman dan tentu saja Prof Yos, Prof Gerung kemudian juga Pak Victor dan tentu saja sahabat kami nih Pak Samsul Rizal dari Aceh.

Kami merasa bahwa memang MBKM ini masih dihadapkan pada banyak masalah. Kit DPR sebetulnya sangat *men-support* setiap inisiatif dan inovasi yang dilakukan untuk memperbaiki pendidikan kita. Namun khusus untuk MBKM ini saya kira memang wajib Pak Fikri nanti kita sebagai panja untuk mendesak kepada Kemendikbud Ristek RI agar segera menyusun kajian akademik terkait MBKM ini, kemudian juga petunjuk teknisnya dukungan (suara terputus).

KETUA RAPAT:

Mute Ibu.

PIMPINAN KOMISI / F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):

Ya jadi dua hal begitu ya terkait dengan aplikasinya dan juga implikasi yang mungkin akan dihadapi atau mitigasinya jika memang hal ini dilakukan dan mengundang problem-problem baru. Jadi saya kira jangan sampai apa yang tadi para tamu kita sampaikan dan juga anggota lengkapi semuanya menurut saya juga sangat relevan itu terjadi. Banyak hal yang mungkin tadi ya keluhan baik itu dari perguruan tinggi, dari mahasiswa dan juga hal-hal lain ya bahkan di DPR pun yang magangnya sudah sangat termasuk rapi dan terorganisir ya Ibu Agustina ya masih ada masalah apalagi di tempat-tempatnya. Ya mudah-mudahan nanti ini dengan adanya panja ini hal tersebut bisa dihindari. Jadi apa yang Pak Ferdi sampaikan ya jangan sampai menjadi kelinci percobaan dan dirugikan tentunya adalah anak-anak kita semuanya.

Sekali lagi kami mungkin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu dan juga mudah-mudahan Pak Fikri kesimpulan kita nanti cukup jelas menyampaikan rekomendasi yang spesifik agar inovasi yang dilakukan ini pertama tentu saja tidak menimbulkan masalah ya dan bisa kita cari mitigasinya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Mohon maaf terpaksa ini saya perpanjang ini waktunya berapa menit? Masa 5 menit? Ini karena masih ada ternyata masih ada Kang Dede Yusuf sama Prof. Zainuddin Maliki. Jadi mohon maaf, berapa? 15 menit? 20 menit ya sekalian nanti untuk respons. Kan ini masa enggak ada respons. Kalau begitu mohon maaf mungkin waktunya. Saya persilakan. Ini kita perpanjang dahulu sampai 20 menit ya.

(RAPAT: SETUJU)

Kemudian Kang Dede Yusuf masih ada? Masih *mute*. Ininya juga enggak ada, gambarnya. Kang Dede? Prof. Zainuddin Maliki? Ini problemnya. Padahal Manado lancar ya? Prof. Grevo Gerung tadi lancar dan suaranya bagus sampai sini Prof.

WAKIL REKTOR 1 UNIVERSITAS SAM RATULANGI (Prof. Dr. Ir. GREVO S. GERUNG, M.Sc.):

Lancar-lancar Manado.

KETUA RAPAT:

Nah ini Prof. Zainuddin Maliki ada di mana ini? Jangan-jangan masih di atas ini? Di gedung ini juga agak susah. Kang Dede Yusuf eror ya. Oke ya sudah. Jadi selanjutnya respons saja. Saya menambahkan sedikit Prof., jadi memang yang disampaikan oleh tim dari Kemendikbud Ristek itu bahwa program ini mengantisipasi mengejar. Jadi menurut penelitian yang disampaikan ke kita itu bahwa *skill* itu berpengaruh kepada di dunia usaha dan prestasi kerja itu hanya 20% sehingga dipengaruhi ini benar atau tidaknya, tapi kemudian yang sangat berpengaruh adalah *softskill*. Itu *softskill* itu *problem solver*, bagaimana cara berkomunikasi dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang akan dikejar oleh MBKM.

Nah ini mungkin relevan atau tidak dan seterusnya ini kayaknya perlu direspons untuk kemudian kita menyusun strategi bagaimana pembelajaran yang baik, yang pas sehingga berkelanjutan. Tidak kemudian akhirnya tadi, secara regulasi kan juga susah ini regulasinya enggak ada kemudian Pak Nino sendiri menyampaikan di sini bahwa tidak seluruhnya ada *academic paper*-nya juga tidak seluruhnya. Jadi naskah akademik tidak seluruhnya ada

tadi ada tanya asesmen nasional sama yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada naskah akademiknya. Jadi kita juga minta supaya menyampaikan sebetulnya *grand design* tapi keluarnya peta jalan keluar satu-satu yang sampai episode 1, episode 2, episode 3, sekarang sudah episode 13. Episode 2 itu yang Merdeka Belajar kemudian Kampus Merdeka. Vokasi itu yang episode 11 kalau enggak salah. Jadi satu itu jadi mengejar *softskills*.

Kemudian yang kedua tentang ini prestasi kualitas pendidikan kita itu kan pakai PISA ya, *Program For International Student Assessment* itu. PISA selalu rendah sehingga literasi, numerasi, dan sains kita pada anak-anak ini bagaimana mengejar maka itulah keluarnya program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Mungkin Dikdasmen mungkin ini lebih kompleks lagi karena dari bawah. Kemudian juga termasuk ini ke kampus-kampus kita ini kan selalu ukurannya adalah *Global University Ranking*. Ini jadi yang ini juga yang dikejar apakah kemudian relevan dengan program MBKM ini.

Karena kan *academic reputation* kemudian *employer reputation* dan seterusnya itu sama sitasi, *international faculty*, *international student*, kemudian *International faculty student ratio* ini yang jadi andalan. Jadi mengejar *world class university* dan seterusnya ini apakah kemudian juga masih relevan dengan program MBKM itu. Karena ini tadi kendalanya lapangan Prof. Yos tadi kemudian Prof. Samsul Rizal, Prof. Grevo Gerung dan juga Pak Victor itu menyampaikan riil di lapangan. Ini lengkap Soalnya ada yang PTN BH, ada yang PTN BLU tadi, kemudian ada yang sampai satker. Yang belum ada ini PTN baru, PTN baru mestinya ada. Jadi satu PTN baru juga harus menyampaikan, ada perwakilan dari yang baru. Kalau di Jawa Tengah ada Universitas Tidar Magelang misalnya itu kan dari PTN baru.

Saya kira itu mungkin saya tambahkan saya Prof. *monggo* Prof. Yos kami utamakan karena di sini lebih berisiko. *Monggo* Prof.

REKTOR UNDIP (Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.):

Terima kasih.

Saya tanggapinya secara umum dahulu. Saya ingin memulainya dulu dengan husnuzan, artinya kebijakan ini baik tetapi di satu sisi saya juga mau memedomani satu falsafah Cina. "Sebelum anda bongkar suatu tembok tanya dahulu tembok ini dahulu dibangun untuk apa" karena hati-hati karena ini masalahnya adalah generasim kalau tidak hati-hati bisa *lost generation*. Berkaitan niatnya memang saya lihat luhur tetapi ketika memang dikaitkan dengan kemudian *world class university* saya agak ragu terus terang ya. Artinya kalau memang yang kemudian yang MBKM yang terakhir ya segala macam karena itu tidak berpengaruh banget lah.

Kemudian bagaimana ini semua? Kunci menurut saya kita lihat dari tadi semuanya bermuara kepada otonomi. Beri otonomi ke kampus itu lengkapi betul dan diserahkan betul keuangannya, akademiknya. Memang akademik betul diberikan. Selama itu tidak pasti kemudian menjadi satu kendala harus begini begitu sistem keuangan seperti itu. Saya sempat

khawatir juga mohon maaf ya karena ada benturan dalam masalah peraturan keuangan misalnya. Bagaimana dengan kemudian yang masih satker-satker itu iya kan yang mereka itu terkunci sudah dengan pola-pola yang sudah pasti tiba-tiba ada pola yang masuk yang polanya ini hanya cocok untuk PTN BH sebetulnya. Nah ini bisa menjadi masalah keuangan ya.

Mungkin ini yang saya khawatir rektor-rektor saya inisiasi jangan coba-coba jadi pahlawan, cukup jadi temannya pahlawan saja. Pahlawan itu masuk bui atau meninggal begitu kan. Teman-teman pahlawan ini kan, karena bukan apa-apa ini dalam konstruksi mengatakan bahwa ini ada regulasi, ini ada satu hal instrumen baru yang tidak tertangkap oleh regulasi ini. Ini yang menurut saya. Ya ini mohon maaf ini kalau ini kebiasaan jadi saksi ahli ini. Oke, jadi otonomi menurut saya yang harus diutamakan dahulu ya.

Kemudian dilihat kesesuaian regulasi-regulasi lainnya. Betul yang disampaikan yang terhormat tadi Mas Kadafi, betul. Ketika asesor datang itu rinci Pak ditanya. "oh ini enggak *anu*, oh ini enggak akan tercapai ini" dengan segala variasinya. Yang sudah *firm* saja itu dibegitukan apalagi kemudian ada hal-hal yang kemudian *something new* seperti itu. Ini yang saya katakan, jadi satu otonomi. Ya kan aturan kan berbasis kebebasan katanya Kampus Merdeka ya merdekakan lah kampus itu dengan segala regulasinya dan segala macam. Walaupun harus dijaga juga.

Sayang khawatir utamanya dengan MBKM terutama seperti yang tadi beberapa itu adalah penjaminan mutunya Pak. Siapa yang bisa menjamin mutu, ya saya enggak tahu apakah yang di sini itu kemudian mereka diajari *legal drafting*, terus diajari penyusunan anggaran misalnya ya, oke. Tapi ketika itu di tempat-tempat yang lain kadang-kadang mahasiswa itu ada mohon maaf ini ada juga spiritnya "yang penting gua bebas". Bebas dia, ini.

Saya punya usul paling tidak jangan 20 SKS-lah perkecil itu ya. Niatnya baik tapi mari kita lihat seperti itu karena misalnya kita tadi disampaikan *softskills*-nya berhasil ketika di dunia kerja, iya tapi untuk bisa masuk pekerja dia harus *hardskill*-nya dahulu bukan *softskill*-nya ya kan? Tes-tesnya kan pas tes, tes yang berat kan *hardskill* baru setelah dia masuk dia jadi politisi di bidangnya istilahnya. Ini jadi *hardskill* menurut saya. Maka yang diutamakan adalah karena tadi otonomi universitas menetapkan dahulu masing-masing prodinya itu kecukupan kompetensi dititik berapa SKS baru kemudian sisanya itu.

Caranya bukan model konversi saja menurut saya, cobalah dibuat misalnya siapa yang *embedded*. Misalnya satu mata kuliah teknik kimia misalnya, kimia organik misalnya, nah kemudian yang dua minggu Anda ke sana tapi dalam kajian tetap dalam koordinasi dosen sehingga dosen tahu betul. Saya betul Pak kalau misalnya mereka itu datang kepada saya. "Pak Yos saya di DPR begini, begini, begini" terus mau dikonversi pakai mata kuliah apa? Sementara mata kuliah itu adalah bangunan keilmuan yang sudah dirancang yang dengan metode yang kemudian ditujukan untuk pencapaian suatu kompetensi. Tiba-tiba ini ada satu hal yang mengambil

salah satu *puzzle* yang ada di situ, enggak cocok begitu loh ya. Ini makanya ya itu bisa di model-model berapa? Jangan 20 misalnya.

Saya setuju tadi *pilot project* dahulu lah ya. Ketika apa pun yang berkaitan dengan pendidikan saya kira kita tidak harus kemudian langsung semuanya. *Pilot project* dahulu 1-2, ada yang PTN BH dan segala macam dan dengan adanya kebebasan itu diharapkan kemudian masing-masing itu kan itu akan alamiah kok, selama ini juga sudah dilakukan kok. Artinya kan kalau kita menolak MBKM lucu juga dahulu kita sudah melakukan kok magang dan segala macam sudah. Tapi ketika memang 20 SKS terlalu besar menurut saya diperkecil, kasih kebebasan, nah kemudian juga instrumen-instrumennya harus lengkaplah. Itu menurut saya demikian, jadi itu pokok-pokoknya adalah satu otonomi deh. Hasil otonomi baik di bidang akademik maupun non akademik. *Insyallah* semuanya lancar.

Kemudian yang berkaitan masalah vokasi dan tadi jadi *alhamdulillah* memang tidak ada satu signifikan Mas Kadafi. Jadi Undip mengelola vokasi bahkan ada kita bentuk untuk menolong teman-teman di Batang, ada yang di Rembang itu dengan PSDKU itu, itu setelah lulus ya indikatornya sampai pencapaian Undip nomor 1, *ranking* 1 untuk universitas yang paling cepat mahasiswanya dapat pekerjaan. Nah berarti di sana itu kan kualitas pendidikannya ya walaupun adalah akademik, satu yang saya sering ini apa yang disampaikanlah guru saya dahulu Profesor Satjipto Rahardjo Beliau selalu menolak begini “yang kita cetak itu sarjana bukan tukang”.

Ketika dia tukang ya mohon maaf itu istilahnya dia hanya kemudian di kelompok nanti pelaksana saja. Tapi yang kita bentuk ini adalah seorang akademisi yang mempunyai kemampuan memimpin sesuatu itu. Nah sekarang ke mana ini arah ketika kemudian pola-polanya ke industri dan segala macam ini untuk apa ini? Untuk menjurus kepada siapa ini? Apakah ke akademisi atau tukang? Makanya ini bagi kami harus jelas, apa yang diharapkan itu. Jadi saya husnuzan ini adalah sesuatu yang bagus tetapi memang perlu diperbaiki segala macam. Ini satu hal yang menurut saya penting.

Kemudian mengenai siap dan kesiapan itu tadi. Saya kira mungkin tadi betul *pilot project* dahulu lah ya. Itu kesulitan teman-teman yang ada karena kemudian jadi IKU, indeks kinerja, berarti (suara tidak jelas) wajibkan. Kasihan teman-teman yang ada di Papua, yang ada di Halmahera. Kalau kacamata kita kacamata Jakarta ya beres tapi kalau kata matanya kacamata yang di luar, berat ya kadang. Ada Mohon maaf Bapak/Ibu sekalian yang terhormat karena di penerimaan mahasiswa baru itu suasananya kalau mohon maaf *alhamdulillah* Undip itu bisa favorit nomor 2, nomor 3 ya jumlah yang masuk itu ada yang bahkan jumlah yang daftar lebih sedikit daripada dayaampungnya.

Saya enggak bisa membayangkan pusingnya kayak apa rektornya itu (suara tidak jelas) segala macam. Apalagi PTNB yang baru itu ya, katanya itu PTN BH terpeleset jadi H-nya hilang jadi PTNB. Itu susahya bukan main itu, regulasi-regulasinya banyak Pak. Mereka susah itu bagaimana teman-teman

yang dahulu sudah di yayasannya kemudian sudah jadi negeri ini tiba-tiba juga jadi semacam pahlawan yang dilupakan. Ini masalah.

Makanya teman-teman ini bingung kenapa enggak juga hal-hal yang mendasar dahulu kita selesaikan masalahnya sambil MBKM oke. Contoh tadi paling gampang kan untuk sekolah harus maksimal 40 tinggal ganti kok Permendikbudnya Nomor 48 Tahun 2009 diganti itu misalkan jadi apa 47, apa 50, apa 60 itu dasar. Kemudian yang hal-hal yang lain “oh yang mengenai izin belajar boleh sampai sekian”. Itu yang mendasar karena itu nanti *pe-ranking-an* internasional itu yang ditanya “berapa jumlah dokter kalian? Berapa jumlah profesor kalian?”. Hal-hal itu yang menurut saya harus dikerjakan dahulu hal-hal yang itu.

Betul Pak PD Dikti itu *Masya Allah*. Lima kali kadang-kadang teman-teman kadang sampai dengan saya tanya ini kok kenapa sih enggak *di-update*? Jelas dia sudah profesor kok masih tertulis hanya doktor saja. Tapi ada yang juga senyum-senyum tuh karena tertulis di situ belum menikah. Dia *update* sudah nikah keluarnya belum nikah lagi. Iya itu hal yang nyata padahal pemeringkatan diambil dari situ. Inilah makanya menurut saya di samping kita bicara MBKM kenapa hal-hal dasar ini enggak diselesaikan ya?

Belum lagi nanti yang PU, pegawai non PNS itu masalah. Masalah eselon Pak belum selesai Pak, enggak selesai itu. Mereka itu diberhentikan enggak, (suara tidak jelas) juga ada tempat di satu universitas bahkan oleh kepala bironya hilang diganti direktur, sudah habis semuanya. Tapi ada suatu tempat lagi ada segala macam. Mereka kadang-kadang “kami ini bagaimana eselon III, eselon IV segala macam?” Nah itu masalah di wilayah PAN RB misalnya, hal-hal itulah. Tapi ada nanti yang saya sampaikan secara khususlah ke teman-teman ya. Jadi mungkin saya kira saya husnuzan dengan MBKM tapi kemudian ada pengaturan, ada perbaikan-perbaikan, itu saja.

Kemudian kalau yang masalah dasar ini kok disentuh Pak. Sama satu lagi langsung saya tanyakan kepada Bapak Presiden. Mohon maaf Pak Presiden yang namanya tunjangan dosen itu dari 2007 enggak pernah berubah, konsisten. Dari 2007 dan tunjangan guru besar itu kalah dengan yang namanya cuma peneliti yang level berapa. Padahal yang guru besar itu malah tiga, penelitian, pengabdian, pendidikan, contohnya seperti itu ya. Ini sekedar *anul* saja lah angin mamiri saja. Siapa tahu angin mamiri jadi angin muson. Ya demikian mohon maaf sedikit dengan gurauan-gurauan karena Rektor Undip itu katanya terkenal ya begitu, gurauannya katanya. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sejak almarhum Prof.

REKTOR UNDIP (Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.):

Muladi?

KETUA RAPAT:

Bukan. Yang sebelumnya yang arsitek.

REKTOR UNDIP (Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.):

Oh, Eko.

KETUA RAPAT:

Prof. Eko ya selalu kemasannya selalu tidak serius, tidak mesti serius karena budayawan kayaknya.

Mohon maaf mungkin waktunya karena sedikit jadi Bapak-bapak narasumber untuk menyampaikan respons mungkin 1 atau 2 menit saja. Selanjutnya saya mohon dengan hormat untuk bisa kirimkan mungkin respons bentuk tertulis. Mohon maaf ini mungkin saya, ini juga sudah melampaui prokes ini. Mudah-mudahan sudah pada sehat, kan ini PPKM-nya sudah turun. *Monggo* Sam Ratulangi masihkah?

WAKIL REKTOR 1 UNIVERSITAS SAM RATULANGI (Prof. Dr. Ir. GREVO S. GERUNG, M.Sc.):

Sudah, sudah. Semuanya sudah komprehensif itu (suara tidak jelas).

KETUA RAPAT:

Dipercayakan sama Prof Yos, sudah dianggap mewakili Prof. terima kasih. Tapi kalau mau nanti mau ada masukan-masukan tentang ini silakan disampaikan secara tertulis Prof. Gerung.

WAKIL REKTOR 1 UNIVERSITAS SAM RATULANGI (Prof. Dr. Ir. GREVO S. GERUNG, M.Sc.):

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kemudian Prof. Samsul Rizal masih? Di *mute*, itu masih, di *unmute*. Bapaknya Pak Kadafi katanya, Kadafi ini kalau mukanya Aceh tetapi tempatnya di Lampung, sekolahnya di Semarang jadi bagaimana ini? Silakan Prof. Samsul Rizal, masih belum bunyi Prof.

WAKIL REKTOR 1 UNIVERSITAS SYIAH KUALA (Prof. Dr. Ir. MARWAN):

Mohon izin Pak Ketua Komisi.

Mungkin Pak Rektornya belum muncul ya. Kalau boleh perkenankan saya untuk menutup saja. Saya kira kami apresiasi atas komunikasi kita pada hari ini. Memang masih banyak kendala namun untuk kita hargai bahwa ini memang dalam upaya kita untuk mendorong supaya lulusan perguruan tinggi itu lebih mudah terserap ke perguruan tinggi ya. Beberapa teman-teman mungkin perlu kita terus perbaiki ya. Saya kira kami Pimpinan perguruan tinggi akan *men-support* agar DPR dapat terus berkoordinasi dengan kementerian ya, beberapa temuan-temuan tadi ataupun hal-hal yang masih kurang ini kita terus tingkatkan ya.

Saya kira ini saja Pak Ketua dari kami. Terima kasih atas kesempatan bisa hadir bersama walaupun secara virtual pada kesempatan ini.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini Pak Victor ada mau?

KETUA TIM HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH (VICTOR MANENGKEY SH., M.H.):

Baik terima kasih Pak Ketua.

Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Halo?

KETUA RAPAT:

Ya silakan 1 atau 2 menit saja ya Pak.

KETUA TIM HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH (VICTOR MANENGKEY SH., M.H.):

Ya seperti apa yang saya sampaikan tadi kami akan sampaikan juga secara tertulis. Mudah-mudahan ada Anggota DPR yang Komisi X yang ada di Papua sekarang ya kalau kita bisa dapat informasi di mana tempatnya atau hotelnya mungkin kita bisa undang ke kampus Uncen untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan masalah ini. Mudah-mudahan ada Anggota Komisi X, kalau ada barangkali mungkin bisa informasikan ke saya.

KETUA RAPAT:

Ya nanti ini nomornya Pak Victor ada, nanti bisa dicatat oleh teman-teman sekretariat dan nanti diberitahu di mananya mereka.

KETUA TIM HUKUM UNIVERSITAS CENDERAWASIH (VICTOR MANENGKEY SH., M.H.):

Oke baik terima kasih Pimpinan Sidang.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Victor.

Saya kira demikian Bapak/Ibu, selanjutnya ini masih harus ada ini kesimpulan/keputusan tetapi atau mungkin disampaikan secara ini tulisannya disampaikan mungkin ke Prof. Yos dan kemudian yang lain dikirim dan sekali lagi mohon maaf karena waktu saya tidak punya kesempatan untuk bisa membaca satu-satu dan ini semuanya sudah direkam. Mungkin ada kekurangan tetapi nanti akan disampaikan juga ke Prof. Yos yang ini *hardcopy*-nya kalau misalnya dibutuhkan nanti *softcopy* juga.

Juga kepada narasumber yang lain juga ini tentang RDP selalu berakhir dengan laporan singkat dan laporan singkat ini tidak mesti sempurna sesungguhnya bisa kita bahas tetapi sekali lagi karena ini dibatasi waktu. Jadi oleh Pimpinan DPR tidak sebetulnya kita standar pertemuan fisik itu cuma 2,5 jam kalau enggak salah sekarang ada kelonggaran 3 jam. Ini sudah 3 jam kita ini dari memulai itu pun karena mundur tadi setengah jam.

Sekali lagi mohon maaf kalau di sana-sini banyak kekurangan dan ini sangat bermanfaat sekali baik itu dari Prof. Yos Johan Utama dari Universitas Diponegoro, kemudian juga Prof. Grevo Gerung dari Universitas Sam Ratulangi, juga dari Profesor Samsul Rizal Rektor Universitas Syiah Kuala, juga dari Pak Victor tadi meskipun belum menyampaikan semuanya tapi beberapa hal mewakili perguruan tinggi negeri satker, ini jadi ada yang PTN BH. Tadi saya sebut memang masih belum ada yang belum lengkap yaitu PTN baru, PTN baru masih belum nanti kita mintakan kalau tidak secara fisik atau virtual bisa juga secara tertulis bisa dikirimkan untuk bisa melengkapi masukan.

Tadi saya kira menarik sekali pernyataan Prof. Yos yang ini kita husnuzan saja dahulu. Jadi bagaimanapun kita apalagi sudah jalan ini sesungguhnya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini sudah berjalan tetapi kesulitan-kesulitan itu juga jangan dibiarkan. Apalagi tadi Prof. Yos mengatakan kalau menyampaikan bahwa apalagi kalau yang ke satker misalnya karena dengan keterbatasan-keterbatasan kewenangan lantas kemudian harus melakukan banyak hal sebagai tuntutan dari MBKM ini nanti ada problematika. Apalagi kalau kemudian terkait dengan keuangan dan seterusnya ini kan nanti malah menjerat. Saya kira mudah-mudahan program ini tidak mudah menjerumuskan seseorang di kampus-kampus itu menjadi ada problematika hukum. Ini Prof. Yos ini radarnya, sensitivitasnya masalah hukum soalnya, sensitivitasnya ya menyelamatkan kita, menyelamatkan pelaku pendidikan baik itu dosen atau tenaga pendidikan di sekitar kampus saya kira begitu.

Jadi bagaimanapun kita husnuzan, berprasangka baik tetapi juga tadi substansi apalagi tadi Ibu Agustina Wilujeng tadi menyampaikan susahnya konversi. Tadi dijelaskan oleh Prof. Yos tadi bagaimana konversi kalau ini harus mengambil mata kuliah yang mana yang mata kuliah ini sudah dibangun dengan bangunan yang kokoh, dengan dasar-dasar keilmuan yang kokoh sementara kemudian kuliah atau magang atau apa itu yang mungkin tidak jelas ini. Kalau dari teknik kimia atau ilmu kimia kemudian di DPR kemudian di sini di fakultas aslinya atau di prodi aslinya lantas mau mengambil dari yang mana? Nah ini kan menggantikan mana ini kan agak susah. Di samping juga saran tadi 20 SKS ini apalagi kalau di akumulasi tadi dari Sam Ratulangi menyampaikan kalau 3 semester kan ada 60, bahkan dihitung sampai 70 dari 144 SKS tampaknya nanti akan mengganggu kompetisi asalnya. Ini saya kira beberapa hal yang menjadi catatan.

Sekali lagi kami perlu menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya terutama Prof. Yos Johan Utama dari Undip dan semua saja segera dari Prof. Gerung, juga dari Pak Prof. Samsul Rizal dan Pak Victor. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan dan atau ada sepatah dua patah kata penutup. *Monggo Prof.*

REKTOR UNDIP (Prof. Dr. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.Hum.):

Tadi ada sedikit terlupa.

Sebetulnya kita punya satu kesempatan yang bisa lebih murah, lebih cepat, MBKM pun bisa masuk ke dalam itu karena tidak menghilangkan waktu. Praktik itu satu semester itu adalah 4 bulan, jadi setahun bisa 3 semester sebetulnya. Kalau itu kita regulasi itu nyatanya praktiknya sudah dijalankan yaitu semester pendek. Misalnya dibuat 3 semester itu biaya kuliah anak-anak akan murah dan mereka akan lulus kalau usia masuk universitas 18, 21 sudah lulus dan siap dengan MBKM ditambahkan tidak mengurangi masa di kampusnya dia.

Itu saja, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Prof. Yos kata akhirnya malah menambahkan ini, mengingatkan pemadatan zaman dahulu ya Prof.

Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua narasumber dan juga kepada Anggota Komisi X yang hadir fisik maupun virtual.

PIMPINAN KOMISI / F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):

Terima kasih Pak Fikri.

KETUA RAPAT:

Ibu Hetifah terima kasih.

Mohon maaf mungkin waktunya cuma sedikit karena memang ya kita tahu bersama dan saya juga tetap masih konsisten menggunakan ini alarm supaya masing-masing kita membatasi diri.

PIMPINAN KOMISI / F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HETIFAH SJAIFUDIAN, MPP.):

Sangat produktif kok Pak Fikri, sangat produktif.

KETUA RAPAT:

Sekali lagi terima kasih atas kontribusinya dan nanti kita akan teruskan, kita olah, kita gabung dengan masukan-masukan dari mungkin nanti selanjutnya perguruan tinggi swasta dan nanti akan kembali kita serahkan. Semuanya ini kayaknya terakhir untuk masa sidang ini ya? Masa sidang ini mungkin terakhir nanti kita akan sudah selesai tentang SKN. Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Demikian dan dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin* maka rapat dengar pendapat hari ini dinyatakan ditutup.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.40 WIB)

JAKARTA, 30 SEPTEMBER 2021

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

**DADANG PRAYITNA, S.IP, M.H.
NIP. 196708061990031003**